

Laporan PLUP Krapyak

Rencana Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Kelurahan Krapyak *(Participatory Land Use Planning)*

Program Peningkatan
Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat
Dalam Beradaptasi Perubahan Iklim
Di Kelurahan Krapyak Kota Pekalongan

November 2021

Kerja sama:

Earthworm Foundation Indonesia-Mercy Corps Indonesia,
Pemerintah Kelurahan Krapyak dan Pemerintah Kota Pekalongan;



Earthworm
Mercy Corps Indonesia



KATA PENGANTAR

Banjir air pasang atau banjir rob menambah beban warga di wilayah pantai Kota Pekalongan, yang selalu datang secara periodik sepanjang tahun. Dalam dua bulan, paling tidak ratusan warga harus tinggal di tengah genangan air pasang yang memasuki permukiman. Bahkan, banjir rob menyebabkan jalan-jalan menuju arah kota terendam dengan ketinggian 30-50 cm. Selain itu, banjir rob juga merendam fasilitas publik dan perkantoran, seperti kantor kecamatan dan Koramil Pekalongan Utara, kantor perbankan, serta sarana ibadah seperti masjid di Kelurahan Krapayak.

Disamping dampak kerusakan infrastruktur, banjir dan rob di wilayah ini menyebabkan meningkatnya angka kerentanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar seperti hilangnya beberapa jenis pekerjaan kelompok masyarakat hingga sumber mata pencaharian.

Saat ini Pemerintah Kota Pekalongan dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun lima stasiun pompa untuk mendukung upaya pengendalian banjir.

Untuk mendapatkan data dan informasi terkini, sekitar pertengahan tahun 2021, Mercy Corp Indonesia (MCI) bersama Earthworm Foundation Indonesia (EFI) melakukan serangkaian penilaian sosial-ekonomi wilayah (*Rapid Rural Appraisal/RRA*) di Kelurahan Krapayak Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

Penilaian RRA yang dilakukan meliputi penilaian potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi. Dari data awal hasil *RRA* menunjukkan bahwa rob dan banjir telah memberikan dampak pada lima sumberdaya wilayah sebagai asset masyarakat dalam membangun wilayahnya.

Selain penilaian potensi wilayah, dilakukan pula penilaian permasalahan yang terjadi akibat rob dan banjir. Dari hasil penilaian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kerentanan kelompok masyarakat khususnya masyarakat yang mata pencahariannya tergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam pesisir. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat masih terbatas dalam beradaptasi rob dan banjir sebagai bagian dari dampak perubahan iklim yang tidak menentu.

Untuk membangun kapasitas adaptasi masyarakat terdampak perubahan iklim, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi dengan memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya, peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal.

Mercy Corps Indonesia (MCI) bersama Earthworm Foundation Indonesia (EFI) dan Pemerintah Kab/Kota Pekalongan, bersama Pemerintah Kelurahan berinisiatif merumuskan perencanaan pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif (*PLUP*).

PLUP ini adalah pendekatan sekaligus metode yang dapat membantu masyarakat dalam menyajikan gagasan perencanaan, memetakan kapasitas wilayahnya, menganalisis situasi wilayahnya, hingga merumuskan strategi dan program meningkatkan kapasitas adaptasi dan mata pencahariannya secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Dan dokumen yang Bapak/Ibu sekalian baca ini adalah hasil fasilitasi PLUP Kelurahan Krapyak. Penyusun sangat terbuka pada semua pihak atas masukan dari laporan ini, semoga dokumen PLUP ini menjadi pertimbangan para pihak dalam mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim, dan mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Pekalongan, November 2021

Tim Penyusun

SAMBUTAN LURAH KRAPYAK



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada EF Indonesia (EFI) dan Mercy Corps Indonesia (MCI) dengan adanya kegiatan PLUP ini.

Dengan adanya kegiatan yang berkaitan langsung dengan petani tambak yang ada di wilayah Krapyak, saya sangat berharap adanya perubahan signifikan terhadap hasil tambak. Saya juga berpesan kepada para warga/petani tambak agar bisa mandiri, jangan bergantung dengan bantuan, tetapi saya lebih menekankan kemandirian untuk bisa lebih maju lagi, apalagi dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tim EFI.

Pembangunan yang ada di wilayah Krapyak ada yang sudah dikerjakan, seperti tanggul parepet di RW19, sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Pembangunan yang saat ini masih dalam proses yakni pembangunan tanggul Kali Loji. Sedangkan rencana pembangunan selanjutnya adalah pembangunan Bendung Gerak yang nantinya sebagai muara dari Sungai (Kali) Loji sekaligus untuk pengendalian banjir air rob.

Sebagai tambahan, di tepian pantai Slamaran juga sudah dibangun wisata air oleh Pemda, meski wisata air tersebut saat ini belum berfungsi maksimal karena pandemi Covid-19. Kami harap kedepannya bisa dimaksimalkan untuk pariwisata.

Selanjutnya, dengan adanya kegiatan oleh EFI dan MCI bersama dengan para stakeholder kami harap dapat tercipta kolaborasi untuk membangun Kelurahan Krapyak sehingga penanganan yang akan dilakukan tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat kepada masyarakat Kelurahan Krapyak. Semoga harapan semua warga nantinya bisa terealisasi dan terlaksana manakala semua pihak bekerja sama dan saling membantu.

Krapyak, November 2021

Banar Budi Raharjo

(Lurah Krapyak)

SAMBUTAN PROSES PLUP TIM EFI-MCI



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah S.W.T atas nikmat kesehatan, kemudian juga nikmat kekuatan dan semangat dari kita semua meluangkan waktu pada acara hari ini, itu jadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi syukur buat kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, tiada yang kita harapkan dikemudian hari kecuali Syafaat dari Beliau, Amin.

Saya bersama tim dan teman-teman FF (field fasilitator) termasuk FF dari Krapyak yaitu Mas Achmad Sachawi dan Mas Abdushomad untuk meneruskan kegiatan yang sebelumnya yaitu RRA dan RRA itu sendiri merupakan suatu kajian cepat di wilayah Krapyak.

Saat ini kita bersama merumuskan perencanaan wilayah kelurahan secara partisipatif (*Participatory Landuse Planning/PLUP*). Tujuan dari kegiatan ini antara lain memetakan potensi dan masalah wilayah Kelurahan Krapyak. Lima sumberdaya yang kita petakan berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Ekonomi, dan Sumber Daya Sosial sebagai asset masyarakat dalam membangun wilayahnya.

Dari potensi wilayah dan permasalahan itu kita berkumpul disini untuk berdiskusi dan mencoba mengurai apa yang harus diperbaiki agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan yang paling penting lagi kegiatan yang kita sampaikan dan kita kerjakan ini tidak hanya berhenti sampai FGD ini saja tetapi bisa sampai nanti masyarakat bisa menjadi lebih baik dan mandiri. Kegiatan PLUP ini dilakukan antara lain sebagai upaya meningkatkan hasil tambak kelompok petani dan pihak lain yang terkait dengan tambak.

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Lurah yaitu Bapak Banar Budi Raharjo atas izin yang diberikan untuk fasilitasi PLUP di Kelurahan Krapyak. Tidak lupa juga saya mewakili dari EFI dan MCI mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak/Ibu masyarakat Krapyak khususnya, atas partisipasinya dalam acara ini.

Demikian sambutan dari saya, apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas partisipasi bapak/ibu sekalian.

Billahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, November 2021

Imam Nur Huda

(Area Koordinator Kota Pekalongan)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah pesisir Pekalongan telah lama terdampak banjir limpasan dan rob, berdasarkan catatan BNPB tahun 2020, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2002-2020 tercatat 66 kejadian banjir di wilayah ini.

Berbagai dampak ditimbulkan akibat bencana ini, bukan hanya kerusakan sarana dan prasarana wilayah serta jaringan saja, namun juga berdampak serius terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar tak terkecuali Kelurahan Krapyak. Situasi ini tidak bisa dipungkiri salah satunya karena akibat perubahan iklim. Berbagai inisiatif dilakukan oleh para pihak, tak terkecuali dari pemerintahan kelurahan dan masyarakat sendiri.

Guna meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, Mercy Corps Indonesia (MCI) bersama Earthworm Foundation Indonesia (EFI) bekerja sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dan Kelurahan berinisiatif mengembangkan program “Penguatan Kapasitas Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Pekalongan”.

Dalam mengawali program ini, telah dilakukan serangkaian kegiatan penilaian (studi) awal wilayah (*Rapid Rural Appraisal/RRA*) beberapa kelurahan dan/desa sasaran hulu dan hilir, yang salah satunya adalah Kelurahan Krapyak.

Dari hasil RRA ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan workshop perencanaan tata guna lahan secara partisipatif (*Participatory Landuse Planning/PLUP*). Sebagai ruang antara masyarakat dan stakeholder lokal dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan desa/wilayahnya.

Workshop PLUP Krapyak diselenggarakan melalui tiga tahap. Pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021, dan tahap kedua dan ketiga masing-masing dilaksanakan pada tanggal 3 dan 12 November 2021. Dari ketiga tahapan PLUP ini, jumlah partisipan yang ikut serta sekitar 35 orang (25 orang dari unsur masyarakat dan 10 orang dari unsur *Field Facilitator*), dengan jumlah laki-laki 31 orang, dan perempuan 4 orang.

Tujuan workshop perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) ini adalah: (i) Memetakan kapasitas sumberdaya wilayah desa/kelurahan; (ii) Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program strategis berbasis potensi desa/kelurahan; (iii) Mendapatkan rumusan program prioritas penguatan kapasitas adaptasi dan mata pencaharian masyarakat.

Hasil workshop PLUP Krapyak:

- Visi PLUP, yakni **"Krapyak Bebas Banjir Rob, Maju, Aman, Sejahtera"**
- Jenis Sumberdaya Alam (SDA) yang sensitif (terdampak rob dan banjir) namun mempunyai nilai sangat strategis terhadap mata pencaharian masyarakat adalah tambak, sungai, rawa-rawa, mangrove dan pantai.
- Ditentukannya zonasi pengelolaan untuk fungsi lindung yang mencakup hutan mangrove, sungai, dan pantai, sementara untuk fungsi budidaya mencakup: pantai untuk wisata dan pemancingan, sungai untuk galangan kapal.
- Tambak diarahkan untuk budidaya udang dan ikan air payau, sementara rawa diarahkan untuk perluasan tambak.
- Sawah diarahkan untuk pengembangan padi sebagai sumber pemenuhan pangan.

9 (sembilan) isu strategis yang menjadi arahan dalam menyusun program strategis untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat Krapyak terhadap perubahan iklim, yakni:

1. Mendorong kebijakan pemerintah agar maksimal dalam menanggulangi rob/banjir
2. Memperbaiki pengelolaan air bersih untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan air bersih
3. Membangun sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial khususnya pendidikan dan kesehatan
4. Memperkuat kelembagaan bisnis dan permodalan kelompok masyarakat.
5. Mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan sektor pertanian, perikanan dan industri batik.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan
7. Meningkatkan kapasitas budidaya petanian dan perikanan.
8. Revitalisasi kelembagaan masyarakat dan kelurahan.
9. Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Peluang usaha Masyarakat Kelurahan Krapyak untuk jangka waktu satu tahun kedepan adalah:

(i) Pembutan desa wisata; (ii) Pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan); (iii) Pengolahan hasil perikanan menjadi beraneka ragam produk; (iv) Pertanian hidroponik sayuran; (v) Penyewaan kapal/perahu untuk wisata pantai; (vi) Kerajinan limbah plastik; (vii) Bank sampah dan pengolahan sampah menjadi pupuk organik.

Dalam PLUP dihasilkan pula Tim Penggerak yang bertanggung jawab mengoordinir atas arahan program strategis, yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam mempercepat pelaksanaan program strategis guna mewujudkan kapasitas adaptasi dan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim di Kelurahan Krapyak.

KREDIT

Narasumber/Partisipan	:	Banar Budi R., Azizi, Hanafi, Imam, Warsuki, Surono, Amintoyo, Asmuni, Mualip. Andi S., Sueb, Hj. Ariyani, Yetno, Roni, Apip, Yatno, Nadirin, Tasioyo, Wartono, Sumargo, Daroji, Kurniawan, Kostiyo, Suwarno, Rasdianto, Dasman, Suwaryo, Rinto Irawan, A. Kholidin, Kasroni, Kunarto.
Kontributor & Pendukung Proses	:	Nofri Iswandi, Sigit Wijanarko, Arif Anshori, Emy Setya D, Okta Dwi F, Maun Kusnandar, Arif, Raggi, Irfan S. Notulen: Achmad Sachawi, M. Aminuddin. Dokumentasi: Catur W.
Fasilitator	:	Imam Nur Huda, Abdush Shomad, Giono, Kuwadi, Nur Rizqiyati, Minarsih, Hermanto
Sumber Peta	:	Peta Penutup Lahan LHK 2020, BIG dan Hasil olahan survei lapangan
Program dan Kerja sama	:	Program Penguatan Kapasitas Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Pekalongan; Kerja sama EFI-MCI Indonesia, Pemerintah Kelurahan Krapyak dan Pemerintah Kota Pekalongan, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
SAMBUTAN LURAH KRAPYAK.....	III
SAMBUTAN PROSES PLUP TIM EFI-MCI	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF	V
KREDIT	VII
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Kerangka konseptual.....	2
3. Tujuan dan Keluaran	7
4. Metode	8
5. Alur Prses Workshop PLUP	9
BAB II. GAMBARAN UMUM KELURAHAN KRAPYAK	13
1. Gambaran Perubahan Wilayah Krapyak.....	13
2. Kondisi Geografi, Demografi & Letak Administrasi	14
3. Penggunaan lahan wilayah	14
4. Aksesibilitas wilayah	16
5. Struktur pemerintah Kelurahan Krapyak	16
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP	17
1. visi PLUP Kelurahan Krapyak.....	17
2. Aset Wilayah Krapyak.....	18
Perubahan dan Kecenderungan Wilayah	25
3. 25	
4. Isu Strategis Kelurahan krapyak	26
BAB IV. ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN.....	32
1. Zonasi Wilayah Kelurahan Krapyak.....	32
2. Arah Strategis Pengembangan krapyak	34
BAB V PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH	35
3. Program Prioritas.....	38
4. TIM PENGGERAK PLUP.....	39
5. LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penggunaan Lahan Kelurahan Krapyak.....	14
Tabel 2: Keterangan Peta Visi PLUP Masyarakat Kelurahan Krapyak	17
Tabel 3: Jenis Aset SDA yang Sensitif terhadap Perubahan Iklim Kelurahan Krapyak.....	18
Tabel 4: Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Krapyak yang sensitif terhadap Perubahan Iklim.....	19
Tabel 5: Kelompok Rentan terhadap Perubahan Iklim (Ancaman Rob dan Banjir) Kelurahan Krapyak...	20
Tabel 6: Sumberdaya Buatan Yang Terpapar Akibat Banjir dan Rob di Kelurahan Krapyak (RW 19).....	21
Tabel 7: Modal sosial (SDS) Masyarakat yang mendukung resiliensi masyarakat Kelurahan Krapyak...	22
Tabel 8: Jenis Komoditas (SDE) Yang dihasilkan Masyarakat Kelurahan Krapyak (RW 19)	23
Tabel 9: Jenis Barang/Komoditas Yang Dibeli (dikonsumsi setiap hari) oleh Masyarakat Kelurahan Krapyak (RW 19)	24
Tabel 10: Perubahan Kondisi SDA Kelurahan Krapyak	26
Tabel 11: Pengelompokan Isu Strategis Kelurahan Krapyak.....	28
Tabel 12: Hasil Penilaian (Skoring) Prioritas Akar Masalah Kelurahan Krapyak	31
Tabel 13: Program Penanggulangan Rob/Banjir	35
Tabel 14: Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pemenuhan Air Bersih	35
Tabel 15: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesejahteraan Sosial	35
Tabel 16: Peningkatan Kebijakan Pemerintah terhadap Penguatan Petani & Sektor Perikanan	36
Tabel 17: Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan	36
Tabel 18: Program Peningkatan Kapasitas Budidaya Perikanan	37
Tabel 19: Program Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan	37
Tabel 20: Program Peningkatan Kapasitas Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim.....	37
Tabel 21: Program prioritas (peluang) usaha Masyarakat Kelurahan Krapyak.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Diagram bagan alir tahapan proses fasilitasi workshop PLUP	9
Gambar 3: Peta Tata Guna Lahan Kelurahan Krapyak.....	15
Gambar 3: Struktur Pemerintah Kelurahan Krapyak.....	16
Gambar 4: Peta Visi Masyarakat Kelurahan Krapyak.....	17
Gambar 5: Peta Sumber Daya yang Sensitif Dampak Perubahan Iklim Kelurahan Krapyak	18
Gambar 6: Peta Perubahan penutup Lahan Kelurahan Krapyak 2021.....	25
Gambar 7: Diagram isu strategis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Krapyak.....	31
Gambar 8: Peta Zonasi Arahan Pengelolaan Tata Guna Lahan Kelurahan Krapyak.....	33
Gambar 9: Diagram Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Krapyak.....	34
Gambar 10: Struktur Tim Penggerak Kelurahan Krapyak.....	39

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kota dan Kabupaten Pekalongan telah lama terdampak banjir limpasan dan rob. Pada kurun waktu 2002-2020, sebanyak 66 kejadian banjir tercatat terjadi di wilayah ini (BNPB 2020). Kejadian banjir ini merupakan kombinasi dari curah hujan yang tinggi, perubahan tata guna lahan dan penampang sungai, serta pasang-surut air laut (Pasaribu et al. 2013). Secara historis, kawasan pesisir Pekalongan memiliki laju kenaikan muka air laut sebesar 5 mm/tahun (COREM-UNDIP 2020); lebih tinggi dari laju di Laut Jawa

secara umum yang sebesar 3,9 mm/tahun (Kismawardhani et al. 2018). Kawasan ini juga menghadapi isu penurunan muka tanah yang diketahui berada pada kisaran 10-17 cm pada periode 2012-2018 (Tempo, 2019).

Kejadian banjir yang berulang ini telah menimbulkan kerugian tidak hanya berupa kerusakan fisik infrastruktur dan hilangnya lahan akibat tergenang permanen, tetapi juga menurunnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk menghadapi banjir. Kondisi ini tentunya memberikan beban baik bagi masyarakat yang terdampak secara langsung, maupun terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah.

Tingginya dinamika perubahan fisik di wilayah pesisir serta perkembangan pembangunan kawasan telah berimplikasi terhadap peningkatan kompleksitas kejadian banjir dan rob, demikian halnya dampak perubahan iklim akan semakin meningkatkan kompleksitas masalah wilayah. Untuk merumuskan langkah pengendalian yang tepat, perlu adanya pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab banjir, interaksi antar faktor tersebut serta kemampuan wilayah dalam merespon.¹

Berdasarkan hasil penilaian secara cepat (RRA)² di 4 (empat) lokasi wilayah pesisir(hilir) Pekalongan, yang mencakup Desa Jeruksari³ dan Kelurahan Bandengan, Krapyak dan Degayu⁴, hasilnya memperkuat pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa dampak perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan masyarakat.

¹ Brief Report - Hazard, Vulnerability and Risk Assessment of Kupang Watershed; Zurich Flood Resilience Alliance; Mercy Corp Indonesia

² Earthworm Foundation Indonesia, September 2021

³ Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

⁴ Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan

Bahwa kerentanan yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor kesadaran dan kapasitas masyarakat, kelembagaan masyarakat hingga faktor kebijakan (implementasi) pembangunan daerah yang dinilai masyarakat belum maksimal.

Ditemukan data bahwa isu kerentanan masyarakat di hulu dan tengah, disamping karena faktor dampak perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam/lahannya yang dampaknya juga mempengaruhi situasi di hilir.

Masalah meningkatnya kebutuhan lahan pertanian, kesadaran budidaya pertanian yang ramah lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan akses kesehatan, aksesibilitas dan jaringan jalan. Lemahnya kelembagaan tani serta soal kebijakan pemerintah daerah yang (dinilai) belum optimal, adalah isu-isu yang cukup banyak ditemukan. Situasi ini menunjukkan bahwa untuk membangun kapasitas resiliensi masyarakat (hulu-hilir) dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi (isu) hulu-hilir, memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS ADAPTASI

Istilah pengembangan masyarakat di Indonesia sudah cukup populer sejak tahun 70-an, dengan berbagai ragam penyebutan istilah dan terminologinya. PBB mengartikan pembangunan masyarakat, sebagai proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Suharyanto dalam teori pembangunan masyarakat desa (*Rural Community Development*) merujuk pada upaya perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang secara umum menggantungkan hidupnya dari pengelolaan sumberdaya alam.

Sementara Arif Budiman, menilai bahwa keberhasilan pembangunan disamping memperhatikan pada pertumbuhan ekonomi (yang tinggi) juga memperhatikan pada keberlanjutan yang di dalamnya menyaratkan pada tidak terjadinya dan/bertambahnya kesenjangan sosial (alienasi dan dehumanisasi) serta tidak dilakukannya perusakan terhadap sumberdaya alam (eksploitasi).

Resiliensi sebagai konsep pengembangan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, meminimalkan, menghilangkan, bahkan mencegah (potensi) dampak dan risiko yang

(berpotensi) merugikan keberlanjutan hidupnya, sehingga sehingga apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

Dalam konteks program adaptasi perubahan iklim, resiliensi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan kelompok petani/masyarakat yang rentan (potensi) terpapar terhadap perubahan iklim yang terjadi, sehingga mampu menganggulangi permasalahan yang terjadi dan dapat beradaptasi atas situasi perubahan-perubahan (lingkungan), dan masyarakat tetap dapat memenuhi mata pencahariannya secara berkelanjutan.

Dalam membangun resiliensi komunitas tidak dapat dilepaskan dengan konsep pengembangan masyarakat. Indikator komunitas resilen, seperti (i) mempunyai kepercayaan diri dan motivasi yang kuat; (ii) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis mendayagunakan SDA/lahannya dengan baik; (iii) Mempunyai aset lahan yang produktif dengan kepastian legalitas penguasaan; (iv) Pendapatan yang cukup; (v) Dukungan kelembagaan sosial yang memadai; (vi) Mempunyai akses informasi yang mudah, jaringan pasar serta akses permodalan serta dukungan kemitraan; dan (vii) adanya dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak; adalah indikator-indikator yang penanda bahwa komunitas tersebut resilen.

Dalam konsep resiliensi, EF Indonesia menggunakan 3 (tiga) jenjang sasaran, yakni, sasaran primer, sekunder dan sasaran tersier. Sasaran primer, fokus pada upaya memperkuat kapasitas individu yang mencakup kepercayaan diri⁵, motivasi⁶ dan kapasitas individu⁷. Sasaran sekunder fokus pada penguatan Kelompok dan Kelembagaan yang mengurus kelompok masyarakat, dalam hal ini yang mata pencahariannya sensitive terhadap dampak perubahan iklim; misalnya kelompok petani secara umum⁸, sementara sasaran tersier fokus

5 Ego merupakan identitas dan karakter pribadi sebagai petani, sehingga mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sesuatu baik potensi atau yang manifest yang melekat pada individu petani.

6 "Mengungkit" dorongan berubah dari diri petani untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini membangkitkan rasa kepercayaan diri untuk berubah guna mencapai suatu tujuan hidup petani baik sebagai individu atau sebagai anggota rumah tangga petani (intrinsik dan ekstrinsik).

7 Pengetahuan dan ketrampilan serta sikap petani, dengan mendorong peningkatan kapasitas berupa pengetahuan dan ketrampilan produksi agar mampu mendayagunakan sumberdaya alam dan lahan yang dimiliki dan/atau dikuasainya agar menjadi produktif, optimal, berdaya guna dan multi guna sehingga mendukung mata pencaharian diri dan keluarganya

8 Termasuk kapasitas organisasi dalam berjejaring dan bermitra baik ditingkat komunitas sendiri maupun dengan jaringan pasar yang lebih luas

pada kemampuan kelompok masyarakat dalam mendorong kebijakan pemerintah agar mendukung (pemecahan masalah dan pencapaian tujuan) kelompok masyarakat⁹.

Ketiga sasaran ini mesti dipenuhi untuk mewujudkan keberdayaan dan kapasitas resiliensi sehingga terwujud masyarakat yang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. PENDEKATAN DAN PRINSIP KEBERLANJUTAN MATA PENCAHARIAN

Gagasan dan konsep penghidupan yang layak (*sustainable mata pencaharian* - SL) tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Robert Chambers di pertengahan 1980-an, yang kemudian dikembangkan oleh Chambers, Conway, dan para ahli yang lain di awal tahun 1990-an. Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh banyak lembaga internasional sebagai alternatif pendekatan pembangunan pada awal 1990an yang dipicu dari maraknya kasus kelaparan dan kerawanan pangan di sejumlah negara pada tahun 1980-an¹⁰

Chambers dan Conway dalam "*Sustainable rural mata pencaharians: Practical concepts for the 21st Century*" (1991:i) memaknai mata pencaharian sebagai orang-orang dengan kemampuan dan cara hidup mereka yang didalamnya termasuk juga makanan, pendapatan dan aset (baik tangible assets berupa sumberdaya dan perbekalan, dan intangible assets berupa klaim dan akses).

Ashley dan Carney, dalam *Sustainable Mata pencaharians: Lessons from Early Experience* (1999), mengemukakan prinsip-prinsip *sustainable mata pencaharian* sebagai berikut: Bahwa dalam kegiatan pembangunan yang fokus pada kemiskinan harus:

- Berpusat pada Manusia/Masyarakat (*people-centered*). Bahwa upaya mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan akan tercapai hanya jika ada dukungan eksternal yang fokus pada apa yang penting bagi orang-orang, memahami perbedaan antara kelompok orang dan bekerja dengan mereka dengan cara yang sama dan sebangun dengan strategi penghidupan mereka saat ini, lingkungan sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan.
- Responsif dan Partisipatif. Bahwa dalam pendekatan *sustainable mata pencaharian*, suatu intervensi yang dilakukan adalah respon atas situasi/problem yang terjadi

⁹ Kapasitas dalam mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung petani dan sector pertanian, seperti kebijakan pengolahan, agroindustri, kebijakan perdagangan (trade policy), seperti perlindungan produk petani, perlindungan harga jual, akses permodalan dan pemasaran dan lain-lain.

¹⁰ Haidar, "Sustainable Mata pencaharian Approach: The Framework, Lessons Learnt from Practice and Policy Recommendations," (2009)

dimasyarakat dan lingkungan sekitarnya. Partisipatif merujuk pada menempatkan orang miskin itu sendiri-lah yang harus menjadi aktor kunci dalam mengidentifikasi dan mengatasi prioritas penghidupan. Orang luar harus terlibat dalam proses yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan dan menanggapi orang miskin.

- Multilevel. Bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang saling terkait dan bertingkat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berjenjang dan bertingkat. Memastikan bahwa kegiatan di tingkat mikro dapat memberikan informasi pada penyusun kebijakan yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang efektif; dan bahwa struktur dan proses di tingkat makro juga mendukung masyarakat untuk membangun kekuatan mereka sendiri.
- Kemitraan. Bahwa mengingat isu kemiskinan banyak factor yang mempengaruhi, maka diperlukan kemitraan dan pelibatsertaan para pihak, baik dari sector public (pemerintah), private (perusahaan) hingga *civil society* (akademisi, LSM)
- Berkelanjutan. Bahwa upaya mewujudkan keberlanjutan *mata pencaharian* masyarakat, perlu menyelaraskan antara aspek ekonomi, sosial (termasuk kelembagaan komunitas) dan ketersediaan sumberdaya alam secara lintas generasi.

3. ASET PENTAGONAL: KOMPONEN MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN

Merujuk pada konsep dan definisi tentang *sustainable mata pencaharian* yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway, yang antara lain menitikberatkan pada aspek kemampuan, aset (*tangible dan intangible*), akses, dan pendapatan, yang oleh DFID dikembangkan menjadi kerangka kerja *mata pencaharian*. Kerangka kerja *mata pencaharian* ini mengidentifikasi 5 (lima) kategori aset utama yang selanjutnya disebut juga sebagai 5 (lima) modal sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Kelima modal tersebut adalah: (i) Modal Sumberdaya Alam; (ii) Modal Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat (Human Capital); (iii) Sumberdaya Kelembagaan Komunitas/Masyarakat (*Social Capitals*); (iv) Modal Fisik (Buatan) (Sarana dan Prasarana serta Jaringan) (Infrastructures and Utilities); dan (v) Sumberdaya Ekonomi dan Keuangan Masyarakat (*Economic and Financial Capitals*)¹¹. Kelima aset tersebut, satu dengan lainnya saling terkait, dan menjadi factor pengaruh kualitas mata pencaharian suatu masyarakat.

¹¹ DFID, 1999

4. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG & PLUP

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah harus memperhatikan pola ruang, yakni kebijakan pembangunan yang menjaga keseimbangan antara fungsi budidaya dan lindung. Lebih lanjut dalam UU ini disebutkan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam peraturan ini merentang dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang ini diatur sedemikian rupa dalam pasal 65, bahwa: (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat; (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: (a) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; (b) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan (c) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat ini selaras dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa saat ini perlu menjadi garda depan dalam proses pembangunan wilayah desa). Paradigma dari “membangun desa” menjadi “desa membangun” menyaratkan kesiapan aparatur pemerintahan desa berserta kelembagaannya dan partisipasi aktif masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijak dan arif, dari pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, modal sosial hingga sumberdaya ekonominya, sebagai modal masyarakat/pemerintahan desa untuk memajukan daerahnya dan memakmurkan masyarakat disekitarnya.

Untuk menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan kawasan perdesaan, maka diperlukan kebijakan yang mendukung keserasian dan keseimbangan fungsi ruang (budidaya dan lindung). Dan untuk mewujudkan agenda tersebut, dibutuhkan inisiasi perencanaan pengelolaan sumberdaya alam/kawasan hutan yang terintegrasi, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya alamnya secara lintas generasi.

Participatory Land Use Planning (PLUP) atau perencanaan tata guna lahan secara partisipatif merupakan konsep perencanaan tata guna lahan pada satuan wilayah yang diselenggarakan secara partisipatif guna merumuskan arahan pengelolaan sumberdaya alam/lahan sesuai dengan peruntukannya, guna mewujudkan keserasian pengelolaan fungsi dan mendukung resiliensi dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Metode Diskusi kelompok terfokus (FGD), *check* dan *recheck* hasil FGD dilakukan melalui pleno, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok lain sehingga menghasilkan data yang andal.

3. TUJUAN DAN KELUARAN

Tujuan kegiatan penyelenggaraan perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) ini adalah:

1. Memetakan kapasitas sumberdaya wilayah desa/kelurahan.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program strategis berbasis potensi desa/kelurahan.
3. Mendapatkan rumusan program prioritas penguatan kapasitas adaptasi dan *mata pencaharian* masyarakat.

Sementara keluaran dari kegiatan PLUP ini adalah:

1. Dokumen rencana pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif pada skala kelurahan.
2. Arahan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan kelurahan/komunitas yang memperkuat kapasitas wilayah dalam merespon dampak perubahan iklim.
3. Program prioritas dan program alternatif pengembangan usaha komunitas yang memperkuat resiliensi dan *mata pencaharian* masyarakat.

4. METODE

Sebelum workshop PLUP, beberapa kegiatan penilaian wilayah telah dilakukan, antara lain:

- *Desktop study*, dilakukan dengan melakukan kajian data pustaka dan analisis data citra satelit dari tutupan lahan (*land cover*) wilayah desa dan/atau kecamatan dalam bentang alam wilayah kota dan kabupaten pekalongan.
- *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, dilakukan wawancara, observasi wilayah, diskusi dan konsultasi hasil olahan peta (*desktop study*) kepada pemangku kepentingan dan narasumber relevan¹².

Sementara saat fasilitasi workshop PLUP, metode yang digunakan antara lain:

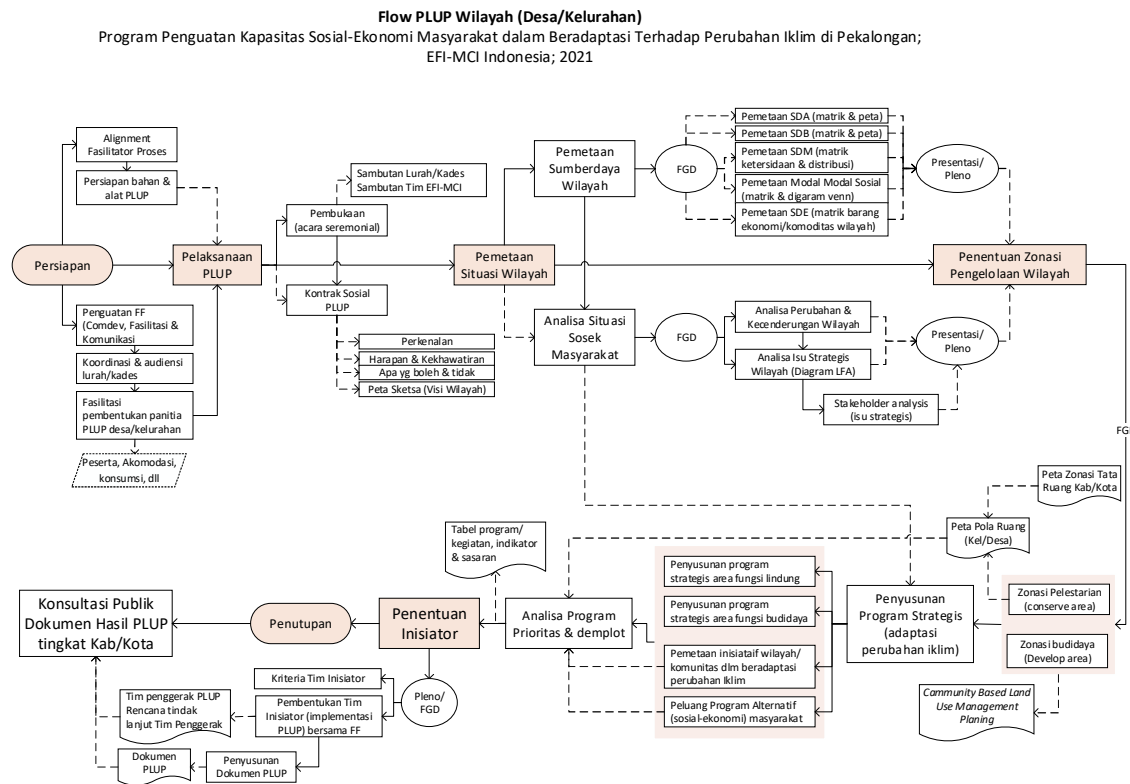
- Kontrak sosial, yakni upaya membangun kesepahaman dan kesepakatan atas perlu/tidaknya diselenggarakannya workshop, dengan tetap menggunakan persetujuan awal dari pemerintahan desa dan masyarakat/desa .
- PRA (*Participatory Rural Appraisal*), yakni sebuah metode pengkajian sumberdaya desa bersama masyarakat/kelompok masyarakat.
- Diskusi Kelompok Terfokus (FGD); dalam proses fasilitasi PLUP, peran fasilitator, membantu mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun langkah-langkah proses kajian dengan masyarakat sebagai narasumber, sekaligus pelaku proses pengkajian dan pelaksana keputusan yang dihasilkan. Dalam proses FGD dilakukan pula *check* dan *recheck* hasil FGD melalui pleno kelompok dan antar kelompok diskusi, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok diskusi lainnya.
- Bahan dan Peralatan (*tool/s*); perlengkapan yang digunakan dalam proses fasilitasi workshop PLUP ini antara lain: (i) Peta dasar land use desa; (ii) ATK, berupa kertas plano, selotip kertas, spidol warna dan metacard (potongan kertas ukuran tertentu untuk mendokumentasikan gagasan masyarakat).
- Dokumentasi, hasil fasilitasi proses workshop dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan komunitas yang menjadi pegangan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang relevan.
- Konsultasi publik, yakni sebuah metode menyampaikan isi dokumen hasil dari workshop PLUP kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan *feedback*, respon dan koreksi (jika diperlukan) serta untuk mengembangkan program kemitraan/kerja sama (kolaborasi) lebih lanjut.

¹² Dalam kajian data primer ini, dilakukan pula Field Diagnostic, sebuah metode diagnosis untuk menilai perspsi masyarakat terkait situasi wilayahnya, terkait dengan mata pencaharian dan resiliensi rumah tangga petani.

5. ALUR PRSES WORKSHOP PLUP

Berikut adalah diagram proses fasilitasi workshop PLUP (*Participatory Landuse Planing*):

Gambar 1: Diagram bagan alir tahapan proses fasilitasi workshop PLUP



Berikut adalah keterangan bagan alir proses fasilitasi workshop PLUP:

1. Persiapan, mencakup:
 - Penguatan kapasitas fasilitator lapangan (Field Facilitators) terkait pengembangan masyarakat, pendekatan partisipatif, teknik fasilitasi partisipatif dan komunikasi.
 - Audiensi dan presentasi kepada stakeholder kunci (kelurahan/desa)
 - Fasilitasi diskusi pembentukan tim pelaksana PLUP tingkat kelurahan/desa bersama pemerintah kelurahan/desa.
 - Identifikasi dan penentuan calon partisipan, penentuan tempat, konsumsi, perlengkapan termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses workshop PLUP.
2. Pelaksanaan, rangkaian acara proses workshop PLUP meliputi:
 - 2.1. Pembukaan
 - Pembukaan acara workshop dilakukan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari kepala desa/lurah dilanjutkan dengan sambutan dari wakil Tim EFI-MCI.

2.2. Kontrak sosial, proses ini mencakup:

- Perkenalan, yakni proses membangun keakraban dan saling mengenal antar partisipan dan antar fasilitator dan partisipan.
- Diskusi kelompok terfokus, yang mencakup: (i) diskusi kelompok harapan dan kekhawatiran; (ii) diskusi kelompok aturan proses (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses diskusi; (iii) diskusi kelompok waktu, yakni kelompok yang membahas jadwal/tata waktu selama kegiatan workshop PLUP; dan (iv) diskusi kelompok peta sketsa visi, yakni kelompok yang membahas peta sketsa visi desa/kelurahan.

2.3. Pemetaan potensi wilayah, mencakup:

- Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya alam (SDA);
- Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya manusia (SDM), terutama tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan masyarakat;
- Diskusi kelompok pemetaan jenis sarana dan prasarana wilayah (sumberdaya buatan/SDB);
- Diskusi kelompok jenis sumberdaya sosial/kelembagaan masyarakat (sumberdaya sosial/SDS), termasuk kelompok/lembaga masyarakat, formal atau nonformal; dan
- Diskusi kelompok jenis sumberdaya ekonomi (SDE), yang meliputi jenis komoditas yang dihasilkan (produksi) dan dijual masyarakat, termasuk lembaga keuangan yang diakses masyarakat.

Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator.

2.4. Pemetaan dan analisis masalah wilayah, dalam proses ini, yang dilakukan adalah:

- Diskusi kelompok perubahan dan kecenderungan wilayah desa/kelurahan dengan merujuk pada jenis SDA penting dan sensitive terhadap perubahan iklim.
- Diskusi kelompok identifikasi masalah dan analisis isu strategis wilayah
- Diskusi kelompok analisa para pemangku kepentingan atas isu strategis wilayah

2.5. Penentuan/pemetaan zonasi pengelolaan wilayah (FGD), mencakup:

- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi perlindungan
- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi budidaya

2.6. Penyusunan program startegis wilayah, yang mencakup:

- Diskusi kelompok program startegis pada zona lindung

- Diskusi kelompok program strategis pada zona budidaya
 - Diskusi kelompok program strategis terkait dengan livelihood masyarakat dan kebijakan yang mendukung adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim
 - Diskusi kelompok analisa program prioritas demplot
 - Diskusi kelompok identifikasi inisiatif masyarakat yang sudah dilakukan
 - Diskusi kelompok penentuan program prioritas untuk satu tahun kedepan
- Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator

2.7. Penentuan Tim Penggerak (inisiator PLUP), tahapan yang dilakukan antara lain:

- Diskusi penentuan kriteria anggota tim penggerak;
- Diskusi pemilihan anggota tim penggerak dan penyusunan rencana tindak lanjut (termasuk penyusunan dokumen PLUP untuk pelaksanaan konsultasi publik)

2.8. Penutup (doa dan foto bersama)

BAB II. GAMBARAN UMUM KELURAHAN KRAPYAK

1. GAMBARAN PERUBAHAN WILAYAH KRAPYAK

Kelurahan Krapyak merupakan gabungan dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak Lor dan Krapyak Kidul yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara. Penggabungan dua kelurahan tersebut berlaku efektif pada 1 Januari 2015.

Mata pencaharaian masyarakatnya beragam mulai dari nelayan, petani, pengusaha, buruh, pegawai, dan ulama. Masyarakatnya sangat dalam menjalankan ajaran islam, dan kebudayaan masyarakatnya-pun unik dibandingkan wilayah lain disekitarnya.

Pada medio 1990an Krapyak masih memiliki sumberdaya alam pesisir yang masih baik, dijelaskan oleh warga peserta PLUP bahwa Pantai Slamaran yang merupakan pantai wisata di Kelurahan Krapyak, sebelumnya memiliki bibir pantai kurang lebih 600 m dibandingkan kondisi saat ini. Selain itu ekosistem dan habitat pantai baik hewan ataupun tumbuh-tumbuhan juga terjaga dengan baik. Selain itu areal persawahan masih luas dan produktif sebagai sumber pangan masyarakat.

Mulai pada tahun 1997 mulai terjadi rob yang masa genangannya tidak bisa diprediksi, dan mulai berdampak pada sawah masyarakat. Pada tahun 2000 terjadi banjir besar yang menenggelamkan beberapa rumah di Krapyak. Dan pada tahun 2005 banyak areal persawahan yang berubah fungsi menjadi areal tambak karena rob yang semakin menggenangi.

Pada tahun 2011 semakin banyak masyarakat yang membuat tambak karena areal sawah yang tergenang semakin meluas karena rob yang semakin parah, rob juga mengakibatkan bibir pantai lambat laun mulai terkikis, semnatra nelayan semakin susah untuk mencari tangkapan ikan, karena areal tangkapan menyempit, terumbu karang rusak, dan semakin tingginya biaya nelayan untuk melaut.

Pada tahun 2016 terjadi banjir rob yang lebih besar dimana semakin menggenangi areal persawahan sehingga lahan sawah semakin berkurang, banyak petani yang gagal panen dan merugi.

Dan tahun 2020 kembali lagi terjadi banjir besar dan rob yang semakin memperburuk keadaan, dampaknya Sebagian masyarakat Krapyak mengungsi, akses jalan terputus, penambak gagal panen, petani sawah gagal panen. Baru pada awal tahun 2021, para petani dan penambak sedikit demi sedikit bangkit dari keadaan.

2. KONDISI GEOGRAFI, DEMOGRAFI & LETAK ADMINISTRASI

1. KONDISI GEOGRAFIS KELURAHAN KRAPYAK

Kelurahan Krapyak terletak di pesisir utara Kota Pekalongan dengan luas wilayah sekitar 378.618 ha, merupakan kelurahan terluas di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Secara geografis termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 1 mdpl. Wilayah ini memiliki intensitas curah hujan 2000-2500 mm/tahun (profil kelurahan 2019).

2. DEMOGRAFI KELURAHAN KRAPYAK

Kelurahan Krapyak memiliki jumlah penduduk 18.527 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9.432 Jiwa dan perempuan sebanyak 9.095 jiwa. Jumlah kepala keluarga sebanyak 5.792 KK, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 2.956 jiwa¹³.

3. LETAK ADMINISTRASI KELURAHAN KRAPYAK

Secara administratif Kelurahan Krapyak merupakan salah 1 dari 7 Kelurahan yang berada di Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Adapun batas Kelurahan Krapyak sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pesisir Utara Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara
- Sebelah Selatan : Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur
- Sebelah Barat : Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara

3. PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH

Berdasarkan data olahan peta tutupan lahan Kelurahan Krapyak menunjukkan bahwa secara umum berupa pantai sekitar 15 ha, permukiman sekitar 77 ha, sawah sekitar 29 ha, sungai dan tambak masing-masing sekitar 15 ha dan rawa sekitar 124 ha. Berdasarkan penggunaan lahannya, kelurahan Krapyak didominasi oleh rawa-rawa (sekitar 45%/124 ha dari 275 ha). Berikut ini adalah tabel penggunaan lahan Kelurahan Krapyak:

Tabel 1: Penggunaan Lahan Kelurahan Krapyak

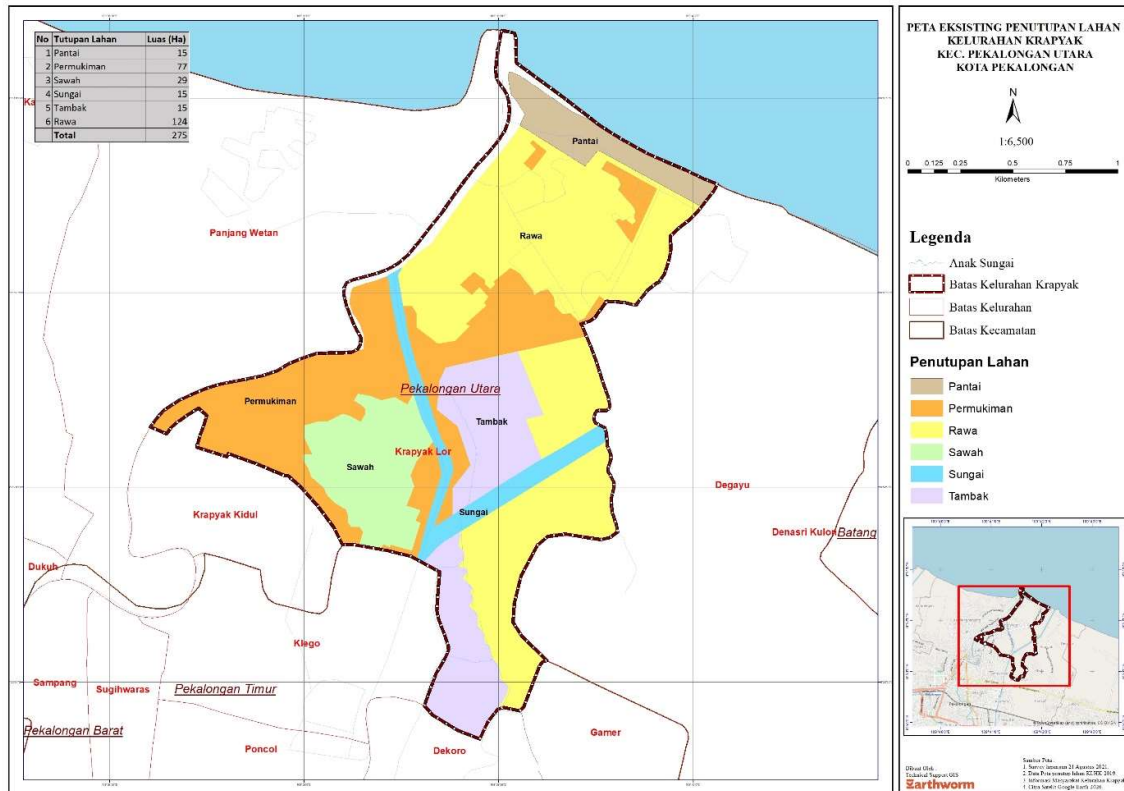
No	Jenis Tata Guna Lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Pantai	15	Abrasi
2	Permukiman	77	Pemukiman masyarakat
3	Sawah	29	Areal sawah yang masih produktif (terancam ROB)

¹³ Data Kependudukan

4	Sungai	15	Areal sungai masih produktif
5	Tambak	15	Areal tambak yang masih produktif (terancam ROB)
6	Rawa	124	Areal genangan tidak produktif

Sumber: Data Monografi Desa 2020

Gambar 2: Peta Tata Guna Lahan Kelurahan Krapyak



4. AKSESIBILITAS WILAYAH

Keadaan orbitas dan jarak tempuh Kelurahan Krapyak dengan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah relatif mudah untuk dijangkau masyarakat. Angkutan menuju Ibu Kota Kecamatan, Kota dan Provinsi tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat.

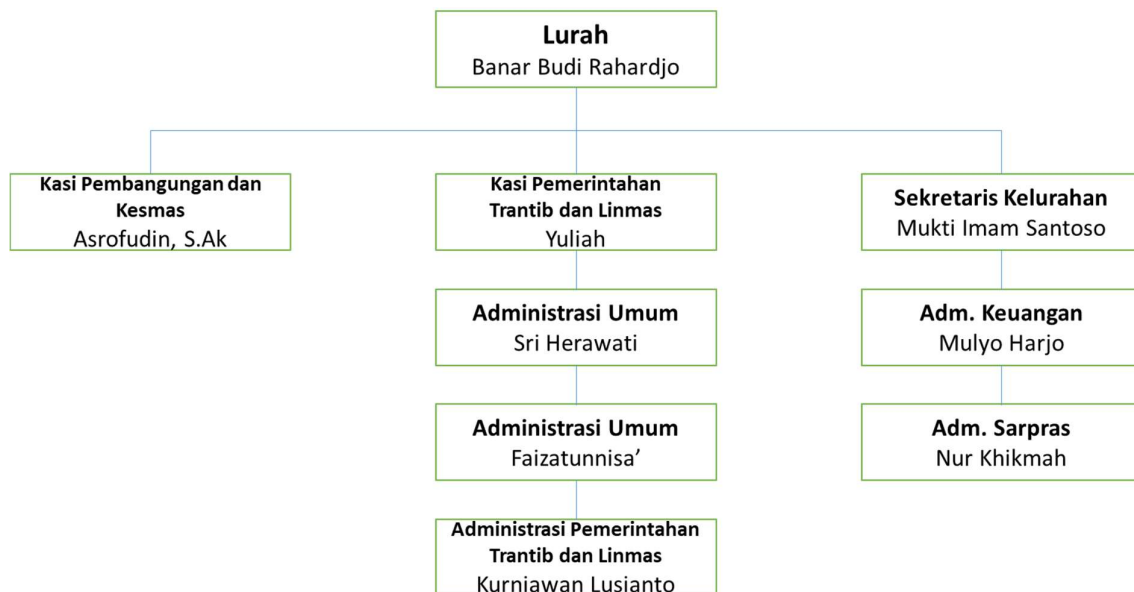
Untuk mengetahui letak/jarak Kelurahan Krapyak dengan pusat-pusat ekonomi dan pelayanan Pemerintahan yang ada di Kota Pekalongan sebagai berikut:

- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 3 Km waktu tempuh 10 menit.
- Jarak ke Ibukota Kota : 4 Km waktu tempuh 10 Menit.
- Jarak ke Ibukota Provinsi : 101 Km waktu tempuh 3 jam.

5. STRUKTUR PEMERINTAH KELURAHAN KRAPYAK

Berikut adalah Struktur Pemerintah Kelurahan Krapyak berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan No. 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Gambar 3: Struktur Pemerintah Kelurahan Krapyak



BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP

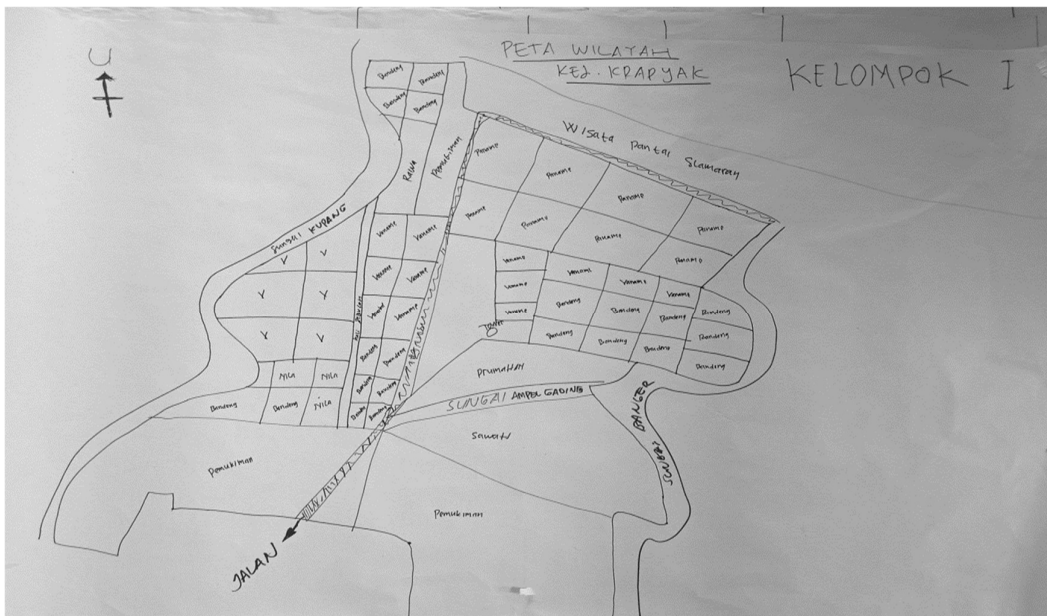
1. VISI PLUP KELURAHAN KRAPYAK

Hasil diskusi perumusan visi PLUP di Kelurahan Krapyak diperoleh rumusan visi sebagai berikut:

“Krapyak Bebas Banjir Rob, Maju, Aman, Sejahtera”

Visi PLUP Masyarakat Krapyak dituangkan dalam gambar sketsa visi masyarakat sebagai berikut:

Gambar 4: Peta Visi Masyarakat Kelurahan Krapyak



Berikut adalah keterangan peta visi (LUP) masyarakat Kelurahan Krapyak:

Tabel 2: Keterangan Peta Visi PLUP Masyarakat Kelurahan Krapyak

No	Harapan/Mimpi Warga Penggunaan Lahan Kelurahan Krapyak	Lokasi
1	Lapangan sepakbola bisa bertaraf nasional	RW 1
2	Wisata Air & Pasar jajan apung	Sungai Loji
3	Industri konveksi & taman baca Kelurahan	
4	kawasan industri	RW 1
5	Harapan jalan cor	RW 5
6	Kawasan observasi, jalan lingk ar utara, SPBU dan wisata pantai serta TPI	RW 9,10,11,12,19
7	Untuk peningkatan tambak (area tambak khusus)	RW 7
8	Tambahan untuk mengoptim alisasi wilayah sesuai batasan tanggul (yang utara masih untuk tambak dan yang selatan tanggul untuk pertanian sawah karena air sudah terpisah dengan air laut)	
9	Penambahan gedung untuk olah raga atau kemajuan Kelurahan.	
10	RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai sarana sosialisasi warga Kelurahan dan daerah resapan air	Setiap RT

2. ASET WILAYAH KRAPYAK

Untuk menilai kapasitas wilayah, dilakukan pemetaan aset desa sebagai modal sebuah wilayah dalam mengembangkan wilayahnya. Aset wilayah yang dipetakan mencakup 5 aset (aset pentagonal) yang mempengaruhi *mata pencaharian* masyarakatnya. Kelima sumberdaya (aset pentagonal) tersebut mencakup: (i) Aset sumberdaya alam (SDA); (ii) Aset Sumberdaya Manusia (SDM); (iii) Aset Sumberdaya Buatan (SDB) atau Sarana-prasarana serta jaringan wilayah; (iv) Aset modal sosial (*social capital*); dan (v) Aset Sumberdaya ekonomi (SDE), mencakup komoditas barang dan jasa serta Lembaga ekonomi. Dalam konteks PLUP ini, aset wilayah yang dipetakan adalah aset yang sensitif (terpapar) terhadap perubahan iklim.

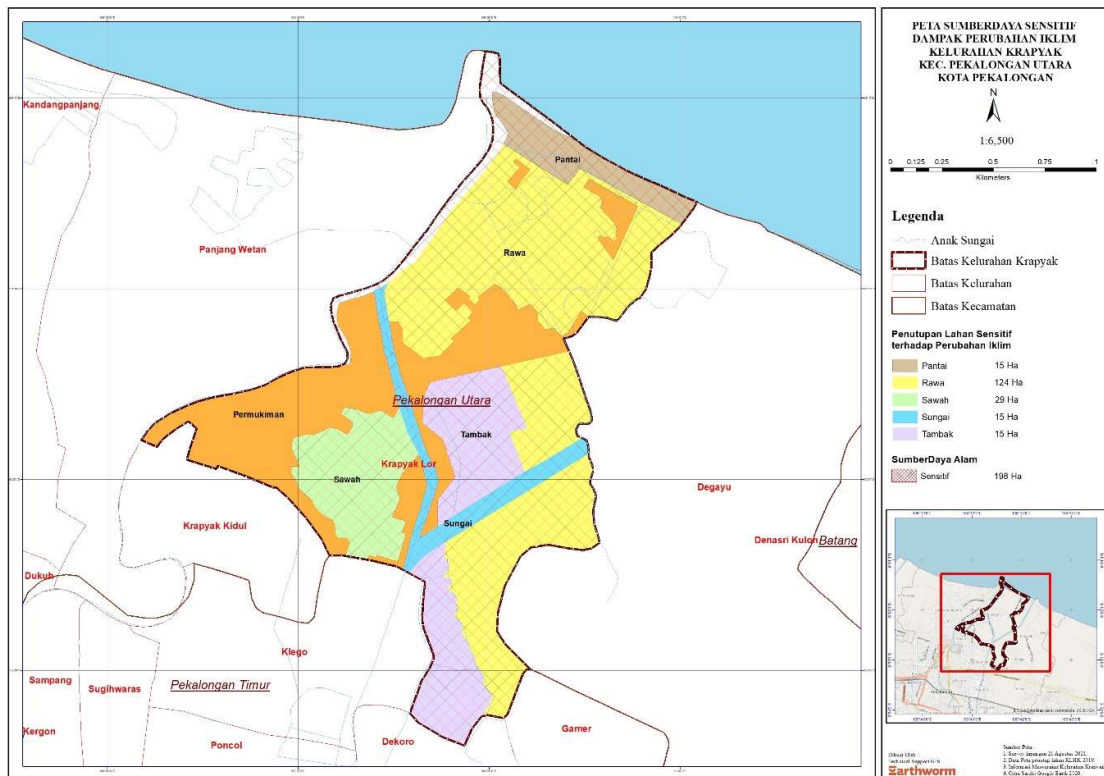
1. SUMBER DAYA ALAM KELURAHAN KRAPYAK

Jenis sumberdaya alam (SDA) yang sensitif (terdampak/terpapar) dari perubahan iklim, seperti rob dan banjir di Kelurahan Krapyak mencakup sumberdaya alam alami maupun buatan. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, adanya perubahan iklim menyebabkan gangguan pada beberapa jenis sumberdaya alam, seperti pantai, sungai, tambak, sawah, rawa-rawa. Berikut adalah tabel jenis sumberdaya alam yang sensitif terhadap perubahan iklim di Kelurahan Krapyak.

Tabel 3: Jenis Aset SDA yang Sensitif terhadap Perubahan Iklim Kelurahan Krapyak

No	Jenis SDA	Jml	Luas	Lokasi (Dusun)	Keterangan
1	Tambak:				
	- Udang Vanami	40	20 Ha	RW 19	Saluran Kurang Bagus
	- Bandeng	25	12,5 Ha	RW 11,19	Saluran Kurang Bagus
	- Nila	10	5 Ha	RW 11,19	Saluran Kurang Bagus
	- Non produktif		17,5 Ha	RW 19	-Air Keruh -Lahan Kurang Subur karena banyak tanaman liar -Saluran banyak yang tertutup -Benteng rusak akibat banjir
2	Rawa	1	15 Ha	RW 11,12	Rusak
3	Mangrove	1	Panjang 1,5 km	Sungai Sibulan RW 10,11,12,19	Baik
4	Sungai:	4			
	-Kupang/Lodji			RW 1,2,3,4,5,15,16	Tercemar
	-Ampel Gading/kali mati			RW 9,10	Mati
	-Sibulan			RW 10,11,12,19	Air Bagus tergantung pengaturan pintu air
	-Banger			RW 19	Baik
5	Sawah	25	29 Ha	RW 1	Saluran irigasi rusak, hanya 1 x masa tanam
6	Pantai	1	15 Ha	RW 19	Terkikis ROB

Gambar 5: Peta Sumber Daya yang Sensitif Dampak Perubahan Iklim Kelurahan Krapyak



2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KELURAHAN KRAPYAK

Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam pemetaan ini adalah jenis sumberdaya manusia yang rentan terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, bahwa jenis pekerjaan yang sensitif terhadap perubahan iklim di Kelurahan Krapyak antara lain nelayan, petani tambak, buruh, dan pedagang. Dan yang paling banyak terpapar akibat perubahan iklim (banjir dan rob) adalah nelayan, buruh jahit, dan petani tambak serta sawah. Berikut adalah tabel jenis pekerjaan masyarakat Krapyak yang terdampak perubahan iklim (banjir dan rob).

Tabel 4: Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Krapyak yang sensitif terhadap Perubahan Iklim

No	Jenis Profesi	Perkiraan Jml (org)	Lokasi (RW)	Keterangan
1	Petani Tambak	± 50	RW 9,10,11,12,19	Bandeng, Vanami, Nila
2	Dagang	± 1000	RW 01 - RW 20	Sembako dan kuliner
3	Buruh Jahit	± 200	RW 19	celana, kaos, daster santung
4	Buruh Pabrik	± 50	RW 01 / RW 19	Maya food, TRM, tekstil
5	Nelayan	± 300	01/02/03/04/05/15/16/19	Nelayan kecil/tradisional
6	Buruh Bangunan	± 1000	RW 01 - RW 20	Jalan, perumahan, Infrastruktur

Selain dilihat dari aspek pendidikan dan profesi, kualitas SDM juga diteliti dari kelompok umur yang juga sangat rentan terhadap bencana alam maupun covid 19 yang saat ini sudah sangat mereda keberadaannya.

Kondisi sumberdaya manusia juga dilihat dari usia rentan baik secara fisik (kesehatan) maupun psikologis (pengaruh negatif lingkungan). Masyarakat kelompok rentan ini perlu diidentifikasi dikarenakan apabila mereka mengalami permasalahan akan menjadi beban pembangunan sebuah kelompok masyarakat. Apabila sebuah kelompok masyarakat mampu untuk menunjukkan kualitas maksimal, maka kemajuan akan lebih cepat dicapai. Berikut adalah tabel kelompok rentan terhadap perubahan iklim Kelurahan Krapyak

Tabel 5: Kelompok Rentan terhadap Perubahan Iklim (Ancaman Rob dan Banjir) Kelurahan Krapyak

No	Kelompok Umur	Perkiraan Jml (jiwa)	Lokasi (RW)	Keterangan
1	Ibu Hamil	± 200	Semua (1- 20)	Mudah terserang penyakit
2	Balita	± 1000	Semua (1- 20)	Usia Lima tahun kebawah mencepet, gatal-gatal, demam)
3	Lansia	± 1500	Semua (1- 20)	Usia 60 Tahun Keatas (pusing, gatal-gatal, Penyakit lain)
4	Disabilitas	± 150	Semua (1- 20)	Semua Usia (Terbatas lingkup gerak, sarana tidak tercukupi)
5	Anak – Anak	± 3000	Semua (1- 20)	Usia 5 – 12 Tahun (Mudah terserang penyakit, tidak fokus belajar, terbatas sarana bermain)
6	Usia Produktif	± 6000	Semua (1- 20)	Usia 17-45 Tahun (Lapangan kerja terbatas, tidak efektif waktu, Pengangguran, masalah sosial/kenakalan remaja)

3. SUMBER DAYA BUATAN (ASET SARANA PRASARANA WILAYAH)

Sumberdaya Buatan (SDB) adalah sarana dan prasarana serta jaringan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana memudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mata pencaharian). Dalam pemetaan sumberdaya buatan (SDB) ini adalah sarana dan prasarana masyarakat dan wilayah yang keberadaannya terdampak akibat rob dan banjir (perubahan iklim).

Berdasarkan hasil pemetaan dalam PLUP yang dilakukan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang terdampak akibat rob dan banjir mencakup rumah dan sarana permukiman warga, jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana olah raga, fasilitas pemakaman, sarana usaha seperti tambak, kolam ikan, hingga perlengkapan nelayan seperti perahu, mesin dan jaring.

Disamping fasilitas diatas, tanggul sungai dan tanggul laut pun mengalami kerusakan, yang sat ini sedang dalam proses perbaikan, termasuk mesin pompa penyedot air juga mengalami kerusakan. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana serta jaringan yang terdampak akibat banjir dan rob di Kelurahan Krapyak.

Tabel 6: Sumberdaya Buatan Yang Terpapar Akibat Banjir dan Rob di Kelurahan Krapyak (RW 19)

No	Jenis SDB	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Jalan Lintas Kelurahan	2 km	Rusak/Banjir	Berlubang/kurang Lebar
2	Rumah	15 unit	Tidak layak huni	Kurang Tinggi
3	Masjid	1	Bagus	-
4	Musholla	1	Bagus	-
5	Pamsimas	1	Bagus	-
6	Posyandu	1	Bagus	-
7	Jembatan	4	Kurang Bagus	Berlubang/perlu perawatan
8	Pompa Air	1	Bagus	-
9	Peralatan nelayan:			
	- Perahu	70	Cukup Bagus	-
	- Jaring	70	Cukup Bagus	-
	- Mesin	70	Cukup Bagus	-
	- Cold Storage	1	Rusak	
11	Tanggul Laut	750 m	80%; 20% Rusak	-

4. SUMBER DAYA SOSIAL (MODAL SOSIAL)

Modal sosial merupakan adalah nilai-nilai dan/atau kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan sosial lainnya yang keberadaanya mendukung kesejahteraan masyarakat. Modal sosial ini dapat berbentuk sikap saling percaya, kekerabatan, sikap tolong-menolong, gotong-royong dan lain-lain, yang berfungsi dalam proses meringankan dan atau/menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam banyak hal modal sosial di masyarakat menjadi jaring pengaman sosial satu sisi dan sebagai instrumen masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Modal sosial ini ada yang bersumber dari nilai-nilai agama, ada pula dari kebiasaan (budaya) masyarakat, dan dalam perwujudannya ada yang melembaga secara formal ada pula yang non formal. Modal sosial ini dalam kontek kebencanaan, mendukung kapasitas adaptasi masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan modal sosial dalam workshop PLUP, diperoleh beberapa jenis modal sosial yang masih cukup banyak dan aktif sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7: Modal sosial (SDS) Masyarakat yang mendukung resiliensi masyarakat Kelurahan Krapyak

No	Jenis Modal Sosial	Jml	Peran	Lokasi	Keterangan
1	Kerja Bakti/Gotong royong	3 RT	3	RT 02	Kebersihan Lingkungan
2	Kematian	3 RT	3	RT 01	Yasin Tahlil, Sumbangan Jariah
3	Posyandu	1 RW	3	RT 03	Kader Pos Yandu
4	Santunan Anak Yatim Piatu	1 RW	1	RT 01	
5	Keamanan		1	Tiap RT	
6	Bansos		1		PKH, BLT, Beras
7	Bedah Rumah		1		RTLH
8	Ormas: NU	1	3		Muslimat, Ansor, Fatayat, Banser, IPNU-IPPNU
9	Kelompok Tani/Tambak	2	3		
9	LPM	1	3		
10	BKM	1	3		
11	PKK	1	1		
12	Karang Taruna	1	1		

Skor peran: 1Kurang Aktif, 2: Cukup Aktif, 3: Aktif

Apabila dilihat dari modal sosial yang ada diketahui bahwa modal sosial masih sangat baik pada kegiatan kerja bakti / gotong royong terutama dalam membersihkan lingkungan, pada kepengurusan kematian warga, serta kegiatan posyandu, serta kegiatan keagamaan. Namun pada beberapa kegiatan menjadi berkurang atau mulai terkikis modal sosialnya. Seperti pada mengurus anak yatim, keamanan lingkungan, bantuan sosial, perbaikan rumah warga

5. SUMBER DAYA EKONOMI (ASET EKONOMI MASYARAKAT)

Aset ekonomi (sumberdaya ekonomi) adalah komoditas, barang baik yang diproduksi, konsumsi maupun yang dijual, dan jasa serta lembaga ekonomi yang mendukung pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan sumberdaya ekonomi dari kegiatan PLUP ini, diperoleh banyak sumberdaya ekonomi, seperti komoditas hasil perikanan, hasil tambak dan kolam.

Dalam mengakses permodalan, masyarakat menggunakan jasa permodalan dari perbankan dan Lembaga keuangan nonbank. Berikut adalah tabel sumberdaya ekonomi Kelurahan Krapyak yang dinilai cukup dominan dan bernilai ekonomi signifikan bagi masyarakat.

Tabel 8: Jenis Komoditas (SDE) Yang dihasilkan Masyarakat Kelurahan Krapyak (RW 19)

No	Jenis Komoditas (Dijual)	Jml (kg/th)	Harga/Satuan/kg (Rp)		Total (Rp/hr)		Jalur Pemasaran
			Rendah (x1000)	Tinggi (x1000)	Rendah (x1000)	Tinggi (x1000)	
1	Udang Fanami	300	35	70	10.500	21.000	Pengepul, Pasar Pekalongan, Dijual Sendiri
2	Udang Windu	400	70	90	28.000	36.000	Pengepul
3	Bandeng	600	15	20	9.000	12.000	Pengepul
4	Ikan Nila	5.000	15	20	75.000	100.000	Pengepul
Total:					122.500	169.000	

Dilihat dari tabel 7 diatas diketahui bahwa pendapatan masyarakat dari perikanan didapatkan dari ikan nila yang kebanyakan diperoleh dari alam. Sedangkan untuk jenis ikan tambak masih belum memberikan dampak ekonomi bagi warga. Perikanan tambak memang masih menjadi permasalahan di wilayah ini yaitu ketersediaan air yang cukup, Teknik budidaya yang tepat, serta pakan yang masih dirasa terlalu mahal bagi petani tambak. Sedangkan untuk nila dapat dikatakan tidak ada permasalahan yang berarti dikarenakan diambil dari alam dan sudah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Sedangkan untuk perikanan dalam satu tahun memberikan masukan pendapatan kepada warga Kelurahan Krapyak sebesar Rp. 1.727.500.000 – Rp. 2.309.000.000. Sedangkan untuk perikanan bila dikonversikan kedalam sumbangan pendapatan harian bagi warga Kelurahan Krapyak adalah Rp. 4.733.000 – Rp.6. 326.000, apabila dibagi rata kepada jumlah KK di Kelurahan Krapyak (5.792 KK) hanya memberikan sumbangan Rp 800 – Rp.1100. Hal ini sangat kecil dunia perikanan memberikan sumbangan rata-rata ekonomi masyarakat.

Apabila dilihat dari kondisi lebih khusus maka pendapatan perikanan tersebut hanya beredar pada sekitar 100 kk yang berprofesi sebagai petambak dengan memberikan sumbangan pendapatan sekitar Rp. 47.330 – Rp. 63.260.

Secara umum pendapatan masyarakat Kelurahan Krapyak, terbanyak adalah dari bidang jasa perdagangan, buruh pabrik, tukang bangunan, dan pekerjaan serabutan lainnya.

Tabel 9: Jenis Barang/Komoditas Yang Dibeli (dikonsumsi setiap hari) oleh Masyarakat Kelurahan Krapyak (RW 19)

No	Jenis Komoditas (dibeli)	Daya Beli	Rp/Satuan (x1000)	Biaya/bl (x1000)	Biaya (Rp/hr)	Dibeli Dari
1	Beras	173.760 kg	10,5 /kg	1.824.480	10.500	Warung – Pasar
2	Gas LPG	11.584 tabung	20 /tabung	231.680	1.333	Warung
3	Gula/kopi/teh	17.376 kg	16 /kg	278.016	1.600	Warung – Alfa
4	Bumbu Dapur	30 hari	5.792 /hr	173.760	1.000	Warung
5	Sayur	5792 kk	100	579.200	3.333	Warung
6	Minyak Goreng	17.376 kg	15	260.640	1.500	Warung
7	Listrik	5792 kk	150	868.800	5.000	Counter, PPOB
8	Air	5792 kk	100	579.200	3.333	Counter, PPOB
9	BBM	115.840 liter	10	1.158.400	6.667	Pertamini/eceran
10	Kuota/Pulsa	5792 kk	20	11.584	67	Counter Pulsa
11	Daging Ayam	43.440 kg	35	1.520.400	8.750	Warung
12	Tempe/tahu	115.840 btg	5 / btg	579.200	3.333	Warung
Total:					46.500	

Dari informasi diatas diketahui bahwa pengeluaran untuk kebutuhan pokok seluruh warga Kelurahan Krapyak dalam 1 bulan (5792 KK) adalah Rp. 8.065.360.000. Sehingga apabila dibagi oleh 5792 KK maka pengeluaran untuk kebutuhan pokok adalah Rp. 1.392.500/bulan/KK, atau sekitar Rp. 46.500/KK/hari.

Melihat dari informasi ini setiap KK di Kelurahan Krapyak paling tidak mempunyai pendapatan minimal Rp. 1.500.000/bulan, atau sekitar Rp. 50.000/hari hanya untuk kebutuhan pokok dalam rumah tangga mereka. Bagi para pemilik tambak yang mempunyai kisaran pendapatan antara Rp. 47.330 – Rp. 63.260, maka pendapatan perikanan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Untuk kebutuhan sekunder tentunya harus diusahakan dari sumber ekonomi lain.

3. PERUBAHAN DAN KECENDERUNGAN WILAYAH

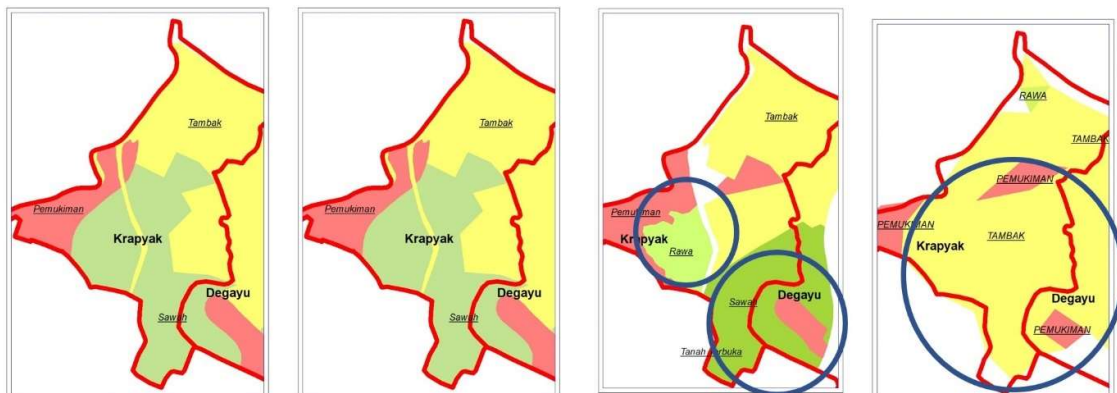
1. PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN KELURAHAN KRAPYAK

Berdasarkan hasil olahan data tutupan lahan kelurahan Krpyak, yang dipresentasikan pada acara PLUP oleh tim GIS, menunjukkan bahwa perubahan kawasan tata guna lahan tahun dari tahun 1990 hingga tahun 2021 menunjukkan perubahan tata guna lahan yang cukup signifikan.

Perubahan tata guna lahan ini dipengaruhi oleh naiknya air laut (rob) sehingga menenggelamkan areal persawahan kawasan terjadi signifikan mulai tahun 2000–2021. Perubahan yang terjadi didominasi naiknya air laut yang semakin tinggi sehingga menenggelamkan areal pertambakan, sementara areal persawahan, diperkirakan sekitar 100 ha tenggelam dan terakhir kawasan pemukiman. Perubahan signifikan terjadi mulai tahun 2000- 2021, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 6: Peta Perubahan penutup Lahan Kelurahan Krapyak 2021

PERUBAHAN PENUTUP LAHAN 1990 , 2000, 2010 DAN 2021 DI KELURAHAN KRAPYAK



Peta perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kelurahan Krapyak berdasarkan peta dari KLHK. Perubahan terlihat dimulai dari tahun 2010 yang sebelumnya merupakan daerah sawah menjadi rawa dan sawah yang tadinya produktif menjadi terbengkelai akibat banjir rob. Kemudian di tahun 2021 wilayah yang dulu sawah juga terendam dan dijadikan tambak.

Adapun penjabaran perubahan sumberdaya alam (SDA) Kelurahan Krapyak dari tahun 1990-2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 10: Perubahan Kondisi SDA Kelurahan Krapyak

No	Jenis SDA	1990	2000	2010	2021	Keterangan
1	Pantai	Baik	Baik	Rusak	Rusak	Abrasi tidak ada pemecah gelombang (Sekarang ada)
2	Sungai	Baik	Baik	Rusak	Rusak	Ada limbah Air sungai Gelap/Keruh
3	Tambak	Baik	Baik	Rusak	Rusak	
4	Sawah	Baik	Sedang	Rusak	Rusak	Hasil pertanian menurun karena salinitas semakin tinggi Menjadi rawa-rawa karena rob
5	Perkebunan	Bagus	Sedang berkurang	Rusak	Rusak	(Kelapa, Melati, Semangka) sekarang menjadi Cemara Laut
6	Rawa	Baik	Sedang	Sedang	Sedang	Rawa: areal berair secara alamiah dalam kawasan negara (bukan akibat rob). Kondisis yang awalnya 3Ha sekarang menjadi 18 ha. Rawa2 ini digunakan untuk: - Pembangunan Pemukiman - Pertambakan

Dari tabel diatas sangat jelas perubahan kawasan yang terjadi di Kelurahan Krapyak sesuai dengan peta yang ada. Perubahan terjadi sangat signifikan antara kurun 10 – 20 tahun ke belakang. Sumberdaya alam Krapyak sebagian besar hilang dan berganti dengan wilayah yang seringkali tergenang saat rob terjadi.

4. ISU STRATEGIS KELURAHAN KRAPYAK

1. PERMASALAHAN KELURAHAN KRAPYAK

Berdasarkan hasil identifikasi masalah¹⁴ yang dinilai menyebabkan masyarakat kurang sejahtera di Kelurahan Krapyak adalah sebagai berikut:

- Tidak adanya lagi tanggul alami di bibir pantai sebagai penghalang.
- Ditebangnya pohon alami seperti pandan duri, druju dan daon (bulung) sebagai penguat tanggul alami disisi kanan kiri sungai dan kisik (pesisir)

¹⁴ Sebagian hasil pemetaan masalah bersumber dari hasil RRA Kelurahan Krapyak, September 2021

- Susah nya untuk melakukan penanaman mangrove di areal pantai karena kondisi yang susah untuk ditanami
- Belum adanya normalisasi sungai, Aliran air sungai tidak bisa terbuang ke laut sehingga air meluap,
- Dibuatnya sungai sodetan yang membuat banjir ROB semakin parah, terutama untuk areal persawahan.
- Produksi sawah menurun karena terendam ROB.
- Tambak tidak produktif dan tidak terawat menyebabkan Jumlah ikan dan jenis ikan yang menurun
- Tidak adanya daerah resapan air
- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat kesulitan mencari pekerjaan
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
- Kurangnya pelatihan dan kursus keterampilan untuk peningkatan kapasitas SDM
- Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah sumberdaya alam (tambak, rawa-rawa, sawah), sehingga menjadikan ekonominya bertumpu pekerjaan buruh (buruh bongkar muat/kuli bangunan/buruh industri/tukang parkir dll)
- Akses jalan banyak yang rusak mengakibatkan jalan terputus
- Drainase tidak berfungsi karena kurang terawat dan banyak sampah menyumbat
- Belum ada pompa pembuangan / penyedot air (rumah pompa)
- Belum adanya saluran irigasi untuk areal persawahan
- Kali sodetan yang memperparah areal pertanian pada saat banjir
- Belum adanya tempat pembuangan sampah yang memadai
- Belum ada tempat sampah dimasing-masing RT
- Kekurangan sarana air bersih karena pipa PAMSIMAS terlalu dalam
- Sanitasi yang kurang memadai dan kurangnya MCK komunal
- Banyak rumah tidak layak huni karena pengurukan yang dilakukan dan genangan air
- Perahu yang mulai terkikis umur
- Cold storage yang rusak dan mangkrak
- Galangan dan Dermaga kapal belum tertata dengan rapi
- Tempat pengepul rosok belum ditata dengan rapi
- Banyaknya lembaga desa yang belum pro aktif dalam penanganan banjir rob
- Belum bersatunya semua lapisan masyarakat dalam menyikapi perubahan iklim
- Masih kurangnya penyuluhan dan edukasi tentang pencegahan bencana ROB
- Pembentukan kelompok baik perikanan ataupun pertanian masih berorientasi bantuan
- Kurangnya pendampingan dan pelatihan untuk kelompok perikanan dan pertanian
- Kelompok masih berjalan sendiri-sendiri belum ada sinergi antar kelompok

- Banji dan rob juga pandemic menyebabkan wisata tutup
- Produktivitas budidaya ikan menurun
- Harga ikan yang murah sedangkan Harga pakan ikan tinggi
- Belum ada diversifikasi usaha untuk olahan hasil tambak / laut
- Harga alat tangkap yang mahal
- Produktivitas padi menurun
- Harga pupuk semakin mahal dan Harga gabah yang anjlok
- Upah buruh jahit dan batik murah
- Kekurangan modal usaha untuk budidaya tambak dan laut
- Belum adanya akses keuangan
- Belum adanya skema bisnis dan rencana bisnis yang matang untuk pengembangan bisnis
- Masih kurangnya pelatihan untuk badan usaha

2. ISU STRATEGIS KELURAHAN KRAPYAK

Proses analisis dalam PLUP ini dilakukn dengan metode *clustering*, yakni sebuah proses analisis yang dilakukan dengan membuat perumpunan atas masalah-masalah yang dipetakan dengan memperhatikan kesamaan masalah/isu. Dalam proses pengelompokan masalah ini kemudian dilakukan perumusan isu strategis. Berikut adalah hasil perumusan isu strategis:

Tabel 11: Pengelompokan Isu Strategis Kelurahan Krapyak

No	Jenis Masalah	Klp. Isu Strategis
1	- Tidak adanya lagi tanggul alami di bibir pantai sebagai penghalang. - Dibuatnya sungai sodetan yang membuat banjir ROB semakin parah, terutama untuk areal persawahan. - Belum adanya normalisasi sungai, Aliran air sungai tidak bisa terbuang ke laut sehingga air meluap - Kali sodetan yang memperparah areal pertanian pada saat banjir - Galangan dan Dermaga kapal belum tertata dengan rapi - Belum ada pompa pembuangan / penyedot air (rumah pompa) - Masih kurangnya penyuluhan dan edukasi tentang pencegahan bencana ROB	Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal
2	- Tidak adanya daerah resapan air - Kekurangan sarana air bersih karena pipa PAMSIMAS terlalu dalam - Banyak rumah tidak layak huni karena pengurukan yang dilakukan dan genangan air - Sanitasi yang kurang memadai dan kurangnya MCK komunal	Krisis pengelolaan air bersih

No	Jenis Masalah	Klp. Isu Strategis
3	- Akses jalan banyak yang rusak mengakibatkan jalan terputus - Belum adanya saluran irigasi untuk areal persawahan - Belum adanya tempat pembuangan sampah yang memadai - Belum ada tempat sampah dimasing-masing RT - Perahu yang mulai terkikis umur - Cold storage yang rusak dan mangkrak	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
4	- Belum adanya akses keuangan - Belum adanya skema bisnis dan rencana bisnis yang matang untuk pengembangan bisnis - Kekurangan modal usaha untuk budidaya tambak dan laut	Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses permodalan
5	- Harga pupuk semakin mahal dan Harga gabah yang anjlok - Harga alat tangkap yang mahal - Harga ikan yang murah sedangkan harga pakan ikan tinggi - Upah buruh jahit dan batik murah	Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada sektor pertanian, perikanan dan industri batik
6	- Drainase tidak berfungsi karena kurang terawat dan banyak sampah menyumbat - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya - Masyarakat kurang menjaga kebersihan - Ditebangnya pohon alami seperti pandan duri, druju dan daon (bulung) sebagai penguat tanggul alami disisi kanan kiri sungai dan kisik (pesisir) - Kurangnya pendampingan dan pelatihan untuk kelompok perikanan dan pertanian	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA dan SDB
7	- Tambak tidak produktif dan tidak terawat menyebabkan jumlah ikan dan jenis ikan yang menurun - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat kesulitan mencari pekerjaan - Kurangnya pelatihan dan kursus keterampilan untuk peningkatan kapasitas SDM - Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah sumberdaya alam (tambak, rawa-rawa, sawah), sehingga menjadikan ekonominya bertumpu pekerjaan buruh (buruh bongkar muat/kuli bangunan/buruh industri/tukang parkir dll) - Masih kurangnya pelatihan untuk badan usaha - Belum ada diversifikasi usaha untuk olahan hasil tambak/laut	Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian dan perikanan
8	- Kelompok masih berjalan sendiri-sendiri belum ada sinergi antar kelompok	Lemahnya kelembagaan

No	Jenis Masalah	Klp. Isu Strategis
	- Pembentukan kelompok baik perikanan ataupun pertanian masih berorientasi bantuan - Banyaknya lembaga desa yang belum pro aktif dalam penanganan banjir rob - Tempat pengepul rosok belum ditata dengan rapi - Belum bersatunya semua lapisan masyarakat dalam menyikapi perubahan iklim	masyarakat (kelurahan)
9	- Produktivitas padi menurun - Produksi sawah menurun karena terendam ROB - Susahnya untuk melakukan penanaman mangrove di areal pantai karena kondisi yang susah untuk ditanami - Banjir dan rob juga pandemic menyebabkan wisata tutup - Produktivitas budidaya ikan menurun	Perubahan iklim tidak menentu

Berdasarkan hasil pengelompokkan masalah di atas, disimpulkan bahwa isu strategis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Krapyak adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal
2. Krisis pengelolaan air bersih
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
4. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses permodalan masyarakat
5. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada sektor pertanian, perikanan dan industri batik
6. Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA dan SDB
7. Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian
8. Lemahnya kelembagaan masyarakat (kelurahan)
9. Perubahan iklim tidak menentu

3. PRIORITAS MASALAH

Dalam mendapatkan prioritas penanganan isu strategis di Kelurahan Krapyak, dilakukan analisis prioritas melalui skoring tingkat pengaruh/dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari masing-masing isu strategis yang diperoleh. Skoring tingkat pengaruh dibuat dengan menggunakan skala likert, 5,4,3,2 dan 1, dimana masing skor bermakna¹⁵:

- Skor 5, untuk menunjukkan dampak sangat besar, dan mempengaruhi banyak orang
- Skor 4, untuk menunjukkan dampak cukup besar, dan mempengaruhi banyak orang/banyak kelompok

¹⁵ Keterangan: jumlah skor bersumber dari hasil akumulasi skoring dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada saat FGD-PLUP

- Skor 3, untuk menunjukkan dampak sekitar 50% dari masyarakat/kelompok masyarakat.
- Skor 2, menunjukkan dampak kecil/sedikit kelompok/orang
- Skor 1, menunjukkan dampak sangat kecil/ 1 kelompok masyarakat

Berdasarkan hasil pleno dan konsultasi hasil skoring diperoleh nilai sebagai berikut:

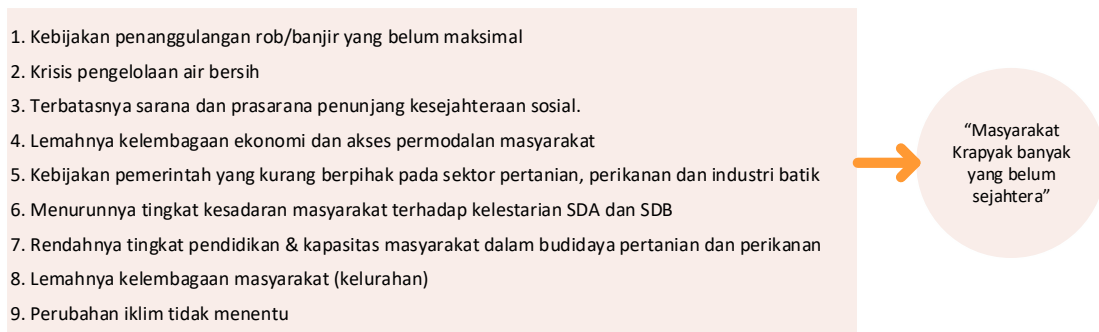
Tabel 12: Hasil Penilaian (Skoring) Prioritas Akar Masalah Kelurahan Krapyak

Jenis Akar Masalah	Skor	Rangking
Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal	11	Prioritas ke-5
Krisis pengelolaan air bersih	9	Prioritas ke-7
Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.	12	Prioritas ke-4
Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses permodalan masyarakat	15	Prioritas ke-1
Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak sektor pertanian, perikanan dan sector industri batik	13	Prioritas ke-3
Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA & SDB	8	Prioritas ke-9
Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian dan perikanan	14	Prioritas ke-2
Lemahnya kelembagaan masyarakat (kelurahan)	8,5	Prioritas ke-8
Perubahan iklim tidak menentu	10	Prioritas ke-6

Merujuk dari tabel di atas, maka susunan isu strategis Kelurahan Krapyak adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal
2. Krisis pengelolaan air bersih
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
4. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses permodalan masyarakat
5. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada sektor pertanian, perikanan dan industry batik
6. Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA dan SDB
7. Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian dan perikanan
8. Lemahnya kelembagaan masyarakat (kelurahan)
9. Perubahan iklim tidak menentu

Gambar 7: Diagram isu strategis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Krapyak



BAB IV. ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN

1. ZONASI WILAYAH KELURAHAN KRAPYAK

Memperhatikan atas visi PLUP, situasi tata guna lahan yang ada, perubahan tata guna lahan yang terjadi dari tahun ke tahun, serta isu strategis yang diperoleh, masyarakat menilai penting untuk ditentukannya zonasi pengelolaan, baik untuk fungsi lindung maupun budidaya. Zonasi pengelolaan ini kemudian menjadi arahan pemanfaatan lebih lanjut terhadap tata guna lahan sebagai bagian dari pemanfaatan atas ruang wilayah kelurahan.

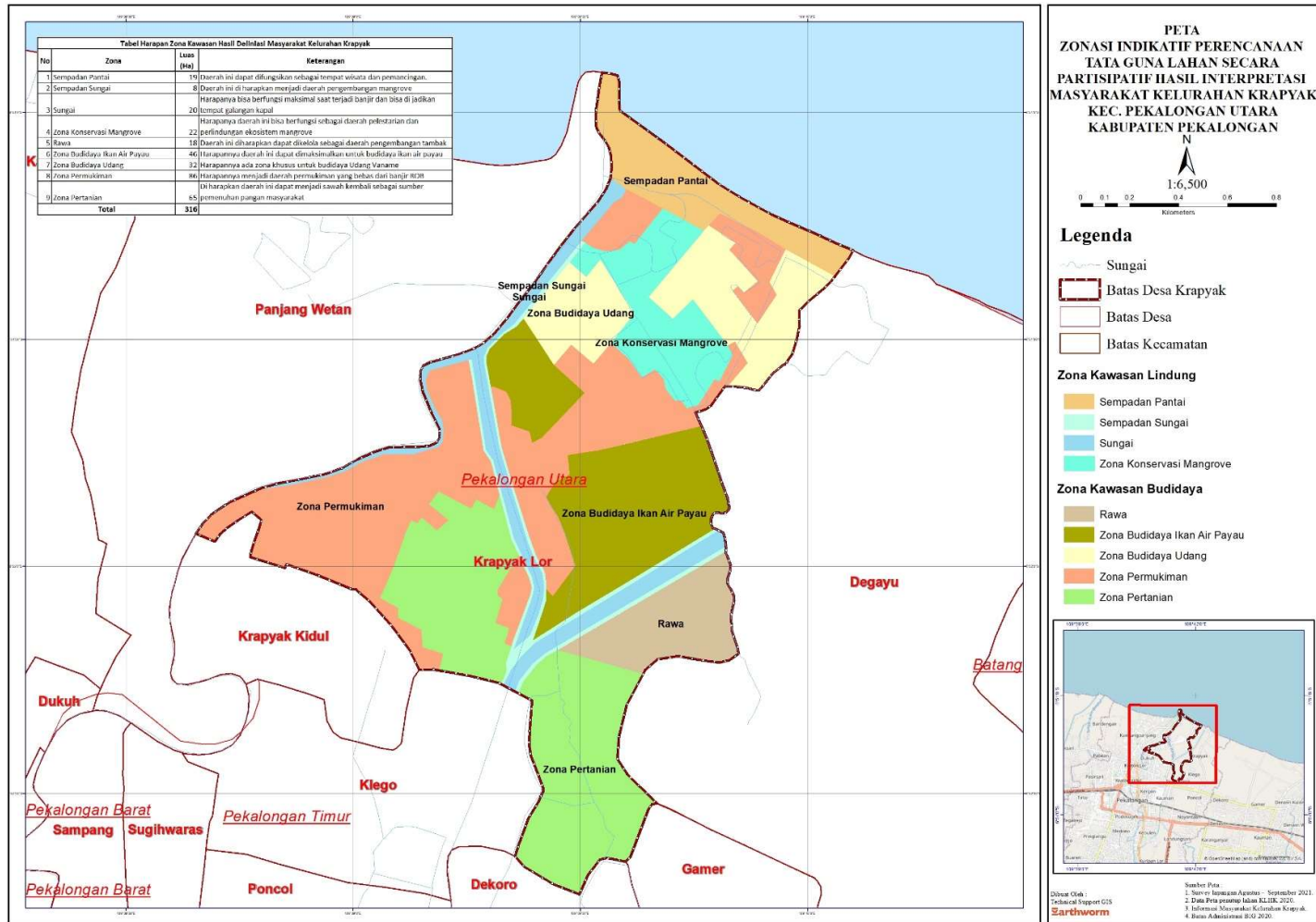
Merujuk pada 6 jenis sumberdaya alam yang dinilai penting, masing-masing diarahkan untuk fungsi lindung/pemanfaatan terbatas adalah mangrove, sungai, dan pantai. Sementara 3 jenis sumberdaya alam lainnya untuk fungsi budidaya, yakni tambak, rawa, pantai dan sawah.

Secara detail arahan pengelolaan untuk masing-masing jenis sumberdaya alam tersebut adalah:

- Pantai, diarahkan untuk wisata dan pemancingan.
- Hutan Mangrove, diarahkan untuk pelestarian dan perlindungan ekosistem (greenbelt) serta sebagai habitat ikan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar.
- Sungai, diarahkan untuk pengembangan mangrove dan galangan kapal
- Tambak, diarahkan untuk budidaya ikan payau seperti udang vanami, bandeng, nila, dan Windu
- Rawa, diarahkan untuk pengembangan tambak.
- Sawah, diarahkan untuk sumber pemenuhan pangan masyarakat.

Berikut adalah peta zonasi arahan pengelolaan atas tata guna lahan Kelurahan Krapyak

Gambar 8: Peta Zonasi Arahan Pengelolaan Tata Guna Lahan Kelurahan Krapyak



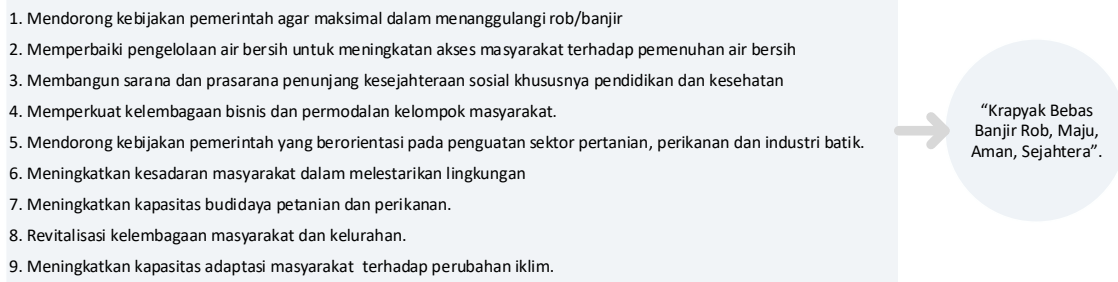
2. ARAHAN STRATEGIS PENGEMBANGAN KRAPYAK

Merujuk pada visi masyarakat, potensi wilayah dan 9 isu strategis yang disimpulkan, maka arahan strategis pengembangan wilayah Kelurahan Krapyak adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kebijakan pemerintah agar maksimal dalam menanggulangi rob/banjir
2. Memperbaiki pengelolaan air bersih untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan air bersih
3. Membangun sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial khususnya pendidikan dan kesehatan
4. Memperkuat kelembagaan bisnis dan permodalan kelompok masyarakat.
5. Mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan sektor pertanian, perikanan dan industri batik.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan
7. Meningkatkan kapasitas budidaya petanian dan perikanan.
8. Revitalisasi kelembagaan masyarakat dan kelurahan.
9. Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Kesembilan arahan strategis di atas, dinilai oleh masyarakat dapat mewujudkan “Krapyak Bebas Banjir Rob, Maju, Aman, Sejahtera”.

Gambar 9: Diagram Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Krapyak



BAB V PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

1. PROGRAM PENDORONG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN ROB/BANJIR

Berikut ini adalah tabel program-program yang perlu dilakukan untuk mendukung agar kebijakan pemerintah maksimal dalam menanggulangi rob/banjir.

Tabel 13: Program Penanggulangan Rob/Banjir

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Penanaman mangrove/wilayah konservasi		DLH, Kehutanan
2	Normalisasi aliran sungai		(DPUPR, DINPERKIM, SWADAYA)
3	Pembuatan rumah pompa dan tanggul		DPUPR
4	Sering berkomunikasi dengan pemda yang berhubungan dengan rob/banjir		Komunikasi dengan penentu kebijakan agar mendapat dukungan program

2. PROGRAM PERBAIKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH UNTUK PENINGKATKAN AKSES PEMENUHAN AIR BERSIH MASYARAKAT

Berikut adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan air bersih.

Tabel 14: Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pemenuhan Air Bersih

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Perbaikan saluran air bersih		Dinperkim
2	Pembuatan MCK komunal		DPUPR dan Dinperkim
3	Penyuluhan RT/RW PHBS		Dinsos dan Dindakop

3. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Berikut adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.

Tabel 15: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesejahteraan Sosial

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Pembuatan sandaran kapal (Kapal Kecil) (RW 19)		Perusahaan
2	Pengadaan alat tangkap ikan		DKP
3	Saluran Air Diperbaiki (drainase)		Seluruh wilayah kelurahan

4. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BISNIS DAN PERMODALAN KELOMPOK MASYARAKAT

Berikut adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk menguatkan bisnis dan permodalan kelompok masyarakat

Tabel 15: Program Penguatan Kelembagaan Bisnis dan Permodalan Kelompok Masyarakat

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Pengolahan ikan hasil tangkap dan budidaya		DKP, Perusahaan
2	Membentuk lembaga akses keuangan/permodalan		Petambak
3	Kerja bakti/gotong royong		RT/RW

5. PROGRAM KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PENGUATAN PETANI, SEKTOR PERIKANAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI BATIK

Berikut adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan petani dan sector perikanan

Tabel 16: Peningkatan Kebijakan Pemerintah terhadap Penguatan Petani & Sektor Perikanan

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Stabilisasi harga pakan		Dinas indag dan UMKM
2	Filterisasi (penggantian air) dan Penelitian (Teknis/Akademisi)		Dinas Pengairan
3	Fasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan		Disperindagkop
4	Peningkatan upah pekerja batik		
5	Perbaikan tata niaga batik pekalongan		

6. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN

Berikut adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan

Tabel 17: Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Bersih pantai		Masyarakat Kranyak
2	Penanaman mangrove		Pantai, Sungai
3	Bakti sosial/Kerja bakti		Semua Masyarakat
4	Paguyuban RT/RW cinta alam		RT / RW
5	Sosialisasi Lingkungan		Semua Warga
6	Lomba Kebersihan Lingkungan		RT / RW

7. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS BUDIDAYA PERIKANAN

Berikut adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas budidaya perikanan.

Tabel 18: Program Peningkatan Kapasitas Budidaya Perikanan

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Pelatihan Budidaya Perikanan		Petambak
2	Pengadaan alat GPS nelayan		DKP
3	Pelatihan pembuatan Pakan Ikan Tambak		DKP
4	Penguatan kelompok petani tambak / nelayan		DKP

8. PROGRAM REVITALISASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT & KELURAHAN

Berikut ini adalah tabel program-program yang perlu dilakukan untuk merevitalisasi kelembagaan masyarakat dan Kelurahan.

Tabel 19: Program Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Sering sosialisasi dan tukar rembug		Masyarakat
2	Memberikan kepercayaan & semangat generasi muda		Masyarakat; Pemuda
3	Kerja bakti		Masyarakat; RT / RW
4	Gotong royong/siskamling		Masyarakat; RT / RW
5	Keteladanan dari tokoh		Tokmas, Ulama, Masyarakat
6	Selamatan (nyadran)		Masyarakat
7	Kegiatan pengajian		Jama'ah; Ormas

9. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Berikut ini adalah tabel program-program yang perlu dilakukan untuk peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Tabel 20: Program Peningkatan Kapasitas Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

No	Program	Indikator	Pihak Terkait
1	Pemberdayaan masyarakat		Masyarakat semuanya (masyarakat kurang berdaya)
2	Penghijauan pantai		RTH (Ruang Terbuka Hijau); Pesisir pantai menjadi hutan mangrove
3	Sosialisasi menghadapi banjir		Masyarakat 100%; (ii) Daerah bebas banjir 100%;
4	Simulasi Bencana		Tercipta masyarakat mampu menghadapi ketika terjadi bencana (siaga bencana)

3. PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas (peluang) yang diharapkan dapat dilakukan untuk mempercepat penanganan permasalahan di Kelurahan Krapyak dalam kurun waktu terdekat adalah sebagai berikut:

Tabel 21: Program prioritas (peluang) usaha Masyarakat Kelurahan Krapyak

No	Program	Indikator	Target
1	Pengolahan berbagai produk perikanan misalnya menjadi bandeng presto, olahan beku (frozen food), trasi, krupuk, dan lain-lain	Terwujudnya usaha pengolahan hasil perikanan yang melibatkan dan bermanfaat kepada masyarakat petambak/pencari ikan	- Masyarakat petambak dan nelayan terlibat 100% dalam usaha pengolahan produk perikanan - Minimal 50% produk perikanan bisa diserap sebagai bahan baku pengolahan
2	Perlakuan pengemasan (packing) yang sesuai dengan standar kemasan produk nasional terhadap hasil olahan perikanan yang telah dibuat	Packing kemasan yang memenuhi standar kemasan nasional (SNI) yang bisa meningkatkan nilai jual maupun keawetan produk	100% produk hasil olahan perikanan dapat terkemas dengan baik sesuai dengan standar
3	Inisiasi pemasaran produk hasil olahan perikanan yang mampu menembus pasar dalam skala luas	Terbentuknya jaringan pemasaran yang mampu menembus wilayah yang luas	100% produk hasil olahan perikanan bisa terjual ke konsumen di berbagai tempat
4	Pengadaan pakan murah yang mampu dijangkau oleh petani tambak dengan kualitas bagus	Adanya pakan murah yang bisa dijangkau oleh para petambak di Kelurahan Krapyak	100% petambak di Krapyak bisa menikmati pakan yang terjangkau harganya dan dengan kualitas bagus
4	Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pakan yang murah dan terjangkau (perusahaan pakan, grosir besar)		50% hasil produksi bisa dijual ke petambak di luar Kelurahan Krapyak
	Memperbaiki jaringan rantai pasok pakan ikan sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih murah		

4. TIM PENGGERAK PLUP

Untuk mewujudkan visi PLUP, arahan strategis pengembangan wilayah Kelurahan Krapyak, mengawal usulan dan pelaksanaan program hasil PLUP, disepakati adanya Tim Penggerak Kelurahan Krapyak.

1. KRITERIA TIM PENGGERAK PLUP

Berdasarkan hasil diskusi dan pleno yang dilakukan, bahwa anggota Tim Penggerak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Usia diatas 25 tahun dibawah 50 tahun
- Kober, bener, pintar (perhatian, sungguh-sungguh, pandai)
- Jujur, anggun jawab, mau kerja keras
- Berani (tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan)

2. TUGAS TIM PENGGERAK KELURAHAN KRAPYAK

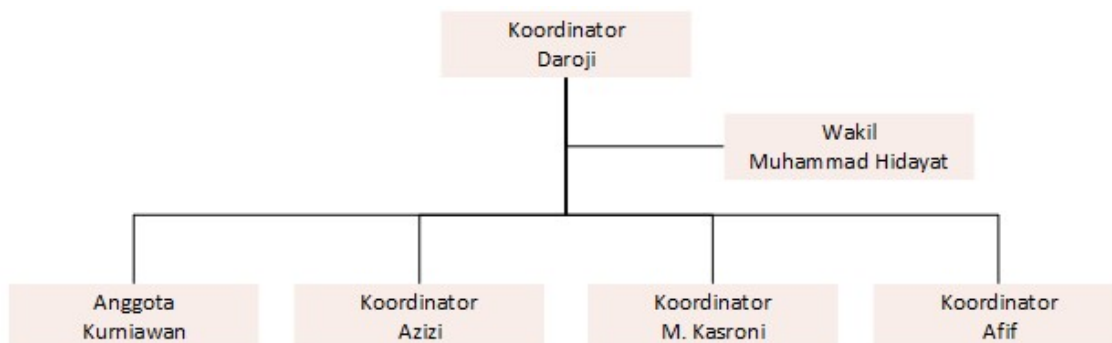
Adapun tugas-tugas Tim Penggerek Kelurahan ini adalah :

- Membangun kemitraan dan Meloby
- Mendorong kesadaran masyarakat
- Mendorong program mengenai kelestarian ekosistem
- Meningkatkan ketrampilan SDM dalam menghadapi perubahan iklim

3. STRUKTUR TIM PENGGERAK PLUP KELURAHAN KRAPYAK

Berdasarkan hasil musyawarah desa yang diwakili oleh masyarakat berbagai unsur, dipilih dan dan sepakati Struktur Tim Penggerak PLUP Kelurahan Krapyak sebagaimana organogram berikut:

Gambar 10: Struktur Tim Penggerak Kelurahan Krapyak



5. LAMPIRAN

1. DAFTAR HADIR PLUP

DAFTAR HADIR FIELD FACILITATOR

HARI / TANGGAL : JUM'AT 29. OKTOBER - 2021

TEMPAT : MASJID AL-BAHAR RW 19
KELUBAHAN KRAPAK

No	Nama	Alamat	Hp	Ttd
1	Ilham N	Pal. Koton	082326045806	1
2	Achmad Sadrini	KRAPAK	085876216757	2
3	ABD. FICHMAD	Krapak	02135267082	3
4	MUR RIZQIYATI	BANDENGAN	085847068121	4
5	KIKIADI	BANDENGAN	085870125332	5
6	MIRASAH	Debayu	081585874667	6
7	Catur Widayanti	Jerukwang	085726586995	7
8				8
9				9
10				10

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL: Jum'at, 29 Oktober 2021

TEMPAT: Masjid AL BAHAR RW 19
KAWATAHAN KAWATAHAN

No	Nama	Aalamat	Keterangan	Hp	Ttd
1	AZIZI	Slamuran			1
2	Hanafi	- - -			2
3	Imam	- - -			3
4	Warsuwi	- - -			4
5	SURONO	- - -			5
6	ARLIN TO	- - -			6
7	ASMAUNI	- - -			7
8	MUALIP	- - -			8
9	Andi S	- - -			9
10	Sueb	- - -			10
11	Wj. Arsyah	- - -			11
12	PYETNO	- - -			12
13	Roni	- - -		0852 0018 8367	13
14	APIP	- - -		0857 1043 1348	14
15	PYATNU	- - -			15
16	NAIDIRIN	- - -			16
17	TASLOYO	- - -			17
18	WARTONO	- - -			18
19	SUMARCO	- - -			19
20	Bomar	Slamuran	Lurah		20
21	AKKOJI	KW. CC.	KORUP. KEP		21
22	KURNIMAWAN	Slamuran		0823 2505 3527	22
23					23
24					24

F6D PLUP KRAPYAK

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : RABU, 3 - NOVEMBER - 2021

TEMPAT : RUMAH PAK RW 19 CG: UDANG SLAMARAN - KRAPYAK

No	Nama	Aalamat	Keterangan	Hp	Ttd
1	KOSTIYO	SLAMARAN		085866043019	1
2	SUWARDI	SLAMARAN	KETUA RT 3/1	08521969942	2
3	Radianto	Slamaraan		08232441296	3
4	Kurniawan	Slamaraan		0823 2505 2527	4
5	DELOJI	Slamaraan	KELUA RW	082514139146	5
6	DASMAN	SLAMARAN			6
7	SUWARDI	SLAMARAN			7
8	APP	Slamaraan			8
9	RINTO KAGAN	Slamaraan		081279940770	9
10	AZIZI	SLAMARAN			10
11					11
12					12

DAFTAR HADIR FIELD FACILITATOR

HARI / TANGGAL : RABU, 3 / 11 / 2021

TEMPAT : Rumah Bpk RW: 19 CG: UDANG SLAMARAN -

No	Nama	Aalamat	Hp	Ttd
1	Kurniawan	Bandenggan	085 870 125 332	1
2	NUR RIZKIYATI	BANDENGAN	0857 47068124	2
3	ABDUS SHOMAD	KRAPYAK	082135267082	3
4	CRONO	Krakpan		4
5	Carut Widayana	Jerukman	085726586995	5
6	Achmad Sachawi	KRAPYAK	0888 7621 6752	6
7	Muranti	Debayu	081585874667	7
8	Manan n Kudu	Kedondongan		8
9				9
10				10

#GD.3

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : JUM'AT, 12-11-2021

TEMPAT : RW:19 Kel. ~~Krapyak~~ Krapyak

No	Nama	Alamat	Keterangan	Hp	Ttd
1	Datoji	Slaman		082314127146	1
2	DASMAN	Slaman			2 Masu
3	A. Kholidun	Slaman			3
4	Kasari	Slaman		088208188367	4
5	Kunakes	Slaman			5
6	Kurniawan	Slaman		08232083527	6
7	Samargo	Slaman			7
8	Azi2i	Slaman			8
9	Henafti	Slaman			9
10	Iman	Slaman			10
11					11
12					12

DAFTAR HADIR FIELD FACILITATOR

HARI / TANGGAL : JUM'AT, 12-11-2021

TEMPAT : RW:19 Kelurahan Krapyak

No	Nama	Alamat	Hp	Ttd
1	ABDUS SHOMAD	Krapyak		1
2	Achmad Sachari	Krapyak		2
3	Imam N. Huda	Pekalongan		3
4	Catur Wijayan	Jember		4
5	Crono	Jember		5
6				6
7				7

2. FOTO PROSES FASILITASI PLUP

